

Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer

Volume 9, No. 2, Oktober 2017

EDITOR IN CHIEF

Ellen Rusliati

EDITORIAL BOARDS

Atang Hermawan, University of Pasundan
Liza L. Nurwulan, University of Pasundan
R. Muchamad Noch, University of Pasundan
Sasa S. Suratman, University of Pasundan

LAYOUTER

Diki Achmad

WEBSITE/IT

Irvan Fansuri
Rafi Alfian

PUBLISHER

Badan Penerbit Jurnal
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan
Bekerjasama dengan ISEI Bandung

Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer terbit pertama kali tahun 2009 merupakan jurnal yang menyajikan artikel penelitian (empiris) serta hasil gagasan konseptual yang kontemporer yang meliputi ilmu akuntansi. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

Alamat Redaksi : Jl. Tamansari No. 6-8 Bandung 40116 Telp. 022-4233646,
fax 022-4208363, E-mail : jrak.feb.unpas@gmail.com
Badan Penerbit Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada para mitra bebestari Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer Volume 9, No. 2 Oktober 2017. Berikut daftar nama mitra bebestari yang terlibat:

- Azhar Affandi, *Universitas Pasundan*, Bandung, Indonesia, Scopus ID: 57189332798
 - Sidik Priadana, *Pasundan University*, Bandung, Indonesia, Scopus ID: 57189323821
 - Jaja Suteja, *University of Pasundan*, Scopus ID: 57190028247
 - Horas Djulius, *Universitas Pasundan*, Scopus ID: 57193535048
-
-

Daftar Isi

Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Volume 9 No. 2 Oktober 2017

Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak <i>R. A. Meiska Lianty, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia</i>	55-65
Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba <i>Inne Aryanti, Farida Titik Kristanti, Hendratno</i>	66-70
Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Nilai Perusahaan terhadap Praktik Perataan Laba <i>Hermawati Nurciptaning Arum, Mohamad Rafki Nazar, Wiwin Aminah</i>	71-78
<i>Intangible Asset</i> , Profitabilitas, dan <i>Sustainability Report</i> terhadap Nilai Perusahaan <i>Annisa Marwa, Deannes Isyuardhana, Annisa Nurbaiti</i>	79-87
<i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Loan Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Loan</i> terhadap Profitabilitas <i>Alfian Agus Putranto, Farida Titik Kristanti, Dewa Putra Khrisna Mahardika</i>	88-93
Opini Audit, Tingkat Kemandirian, dan Tipe Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi <i>Annisa Murni Prasasti, Sri Rahayu, Djusnimar Zutilisna</i>	94-103

DISCLAIMER

1. Isi naskah di luar tanggung jawab redaksi dan penerbit Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer FEB Unpas.
2. Redaksi berhak untuk tidak menayangkan tulisan yang tidak sesuai dengan isi/topik terkait, atau tulisan yang mengandung unsur-unsur plagiarisme, ataupun yang bersifat spam/junk, polemik SARA, fitnah, hasutan dan/atau yang dirasa akan dapat merugikan kredibilitas orang/pihak/institusi tertentu.
3. Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan tulisan yang bersangkutan.

PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

R. A. Meiska Lianty

lmeiskalianty@students.telkomuniversity.ac.id

Dini Wahjoe Hapsari

Kurnia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Abstract

This study aims to discover how the effect of the tax knowledge, tax socialization, and tax authorities service, either simultaneously or partially, on the taxpayers compliance in KPP Pratama Bandung Bojonagara. The research samples are the whole number of the non-employee individual taxpayers in the amount of 100 people. The sampling technique is convenience sampling and the analysis method is using multiple linear regression. Simultaneously, the tax knowledge, the tax socialization, and the tax authorities service significantly affect the taxpayers compliance in KPP Pratama Bandung Bojonagara. Partially, the result shows that both the tax knowledge and the tax authorities service significantly have positive effect and are directly proportional on the taxpayers compliance. On the other hand, the tax socialization has no significant effect on the taxpayers compliance in KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Keywords : *tax knowledge, tax socialization, tax authorities service, taxpayers compliance, non-employee individual taxpayers*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus baik secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak OP (Non Karyawan) yang berjumlah 100 orang. Teknik sampel yang digunakan adalah convenience sampling dan metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Secara parsial, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Kata Kunci : pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, kepatuhan wajib pajak, wajib pajak non karyawan

PENDAHULUAN

Suatu negara dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara, oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan negara.

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak adalah *tax ratio*. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menyatakan bahwa semakin besar *tax ratio* menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa semakin besar pula porsi penerimaan pajak dalam APBN. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia yang saat ini berada di kisaran 11% (persen) masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organization on Economic Cooperation and Development* (<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-tax-ratio-indonesia-di-bawah-standar>, 2016). *Tax ratio* di Indonesia yang hanya berkisar sebesar 11% dan masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN dan *Organization on Economic Cooperation and Development* menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam APBN masih tergolong rendah. Dalam lima tahun terakhir berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, diketahui bahwa penerimaan pajak tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN dan persentase realisasi penerimaan terhadap anggarannya pun terus menurun setiap tahunnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan rasio kepatuhan pajak atau *tax compliance ratio*. Namun faktanya, di Indonesia rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta

orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Kemudian dari jumlah 30.044.103 WP yang terdaftar, didapatkan sebanyak 18.159.840 WP Wajib SPT yang Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dan dari jumlah tersebut baru 10.945.567 WP atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan (<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak>, 2016).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjadikan KPP Pratama Bandung Bojonagara sebagai objek penelitian dan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai responden untuk menjawab kuesioner penelitian. Di KPP Pratama Bandung Bojonagara terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah realisasi SPT jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah WP OP (Non Karyawan) Wajib SPT. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan) KPP Pratama Bandung Bojonagara

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak OP (Non Karyawan) yang Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Wajib Pajak OP (Non Karyawan)	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak OP (Non Karyawan)
1	2012	16.677	5.267	32%
2	2013	12.126	5.470	45%
3	2014	9.826	5.413	55%
4	2015	8.073	5.667	70%

Sumber: KPP Pratama Bandung Bojonagara (2016).

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara hingga tahun 2015 baru mencapai 70%, dimana dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) yang terdaftar Wajib SPT sebanyak 8.073 Wajib Pajak hanya sebanyak 5.667 Wajib Pajak yang melaporkan atau menyampaikan SPT. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan/kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Zuhdi, et al, 2015). Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak

Besar Hatipah Haroen Al Rasjid, pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal (<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/12/18/262926/kesadaran-masyarakat-bayar-pajak-minim>, diakses 03/03/2017). Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik Wajib Pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Zuhdi, et al 2015). Didukung oleh penelitian yang dilakukan Zuhdi, et al (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Murti, et al (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan Oladipupo dan Obazee (2016), Saad (2014), dan Palil, et al (2013). Tetapi tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015) juga menyatakan bahwa pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri (2015).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito menjelaskan, masih belum maksimalnya penerimaan pajak oleh pemerintah bukan semata-mata kesalahan masyarakat. Sigit mengaku pihaknya juga kurang bekerja maksimal. Sigit mengungkapkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (WP) yang masih minim disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. DJP mengakui kesalahannya tersebut. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, dikatakan Sigit, pada tahun ini dirinya akan bekerja lebih maksimal dimana pemerintah juga telah mencanangkan di tahun 2015 sebagai tahun pembinaan untuk seluruh wajib pajak (<http://bisnis.liputan6.com/read/2338480/penerimaan-pajak-masih-rendah-dirjen-pajak-mengaku-salah>, diakses 24/01/17). Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan masyarakat atau Wajib Pajak dalam membayar pajak yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak bukan semata-mata karena kesalahan mereka, tetapi ketidakpatuhan masyarakat atau Wajib Pajak juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,

karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, et al 2015), dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau Wajib Pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013), yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Namun, tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari, et al (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Musfialdy (2016) serta Andreas dan Savitri (2015).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pelayanan fiskus. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Murti, et al 2014). Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, dikatakan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), dan etika (*code of conduct*) (Andreoni et al. 1998). Ketiga hal tersebut lebih ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan (<http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>, diakses 18/12/16). Wajib Pajak secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan bila terdapat pelayanan yang baik oleh aparat perpajakan (Yuliasari, et al 2015). Dengan kata lain, dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak atau fiskus maka akan membuat Wajib Pajak merasa senang dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat Wajib Pajak konsisten atau cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari, et al (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Murti, et al (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Didukung pula oleh penelitian Andreas dan Savitri (2015). Namun, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penelitian yang dilakukan oleh Andinata (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut dan karena adanya inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pratiwi (2012), Winerungan (2013), Andinata (2015), Yuliasari, et al (2015), Andreas dan Savitri (2015), serta Savitri dan Musfialdy (2016), peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) Yang Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2015)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan WP OP (Non karyawan), sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan WP OP (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan dan parsial pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2015.

Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Dengan Wajib Pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, et al 2015). Menurut Rahayu (2010:29), dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Zuhdi, et al (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Murti, et al (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan Oladipupo dan Obazee (2016), Saad

(2014), dan Palil, et al (2013). Hipotesis yang diajukan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, et al 2015), dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau Wajib Pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013) yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Rahayu (2010:141), dengan DJP melakukan sosialisasi perpajakan secara intensif dan kontinyu maka akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajibannya membayar pajak. Sehingga akan membuat Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hipotesis yang diajukan, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 dikatakan bahwa pelayanan fiskus/pelayanan prima merupakan pelayanan yang berkualitas dan bermutu yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kebutuhan dan harapan Wajib Pajak dan bertujuan untuk mencapai tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan. Wajib Pajak secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan bila terdapat pelayanan yang baik oleh aparat perpajakan (Yuliasari, et al 2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa senang dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam kondisi Wajib Pajak merasa senang, nyaman, dan puas atas pelayanan yang diberikan

akan membuat Wajib Pajak konsisten atau cenderung untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Menurut Rahayu (2010:28) dengan adanya pelayanan bersifat prima atau pelayanan yang baik yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak dapat mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka Wajib Pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari, et al (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan penelitian yang

dilakukan oleh Murti, et al (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Didukung pula oleh penelitian Andreas dan Savitri (2015). Hipotesis yang diajukan, Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara.

METODE

Operasionalisasi variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. (Mardiasmo, 2016:7).	1. Pengetahuan Hukum Pajak Materiil. 2. Pengetahuan Hukum Pajak Formil.	Ordinal
Sosialisasi Perpajakan (X_2)	Suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011)	1. Penyuluhan Langsung. 2. Penyuluhan Tidak Langsung.	Ordinal
Pelayanan Fiskus (X_3)	Pelayanan yang berkualitas dan bermutu yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kebutuhan dan harapan Wajib Pajak dan bertujuan untuk mencapai tingkat kepuasan Wajib Pajak yang tinggi atas pelayanan perpajakan. (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima)	1. Waktu pelayanan di TPT (KPP) adalah pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat; 2. Wajib Pajak memperoleh pelayanan sebagai berikut: a. Pada area umum, WP boleh dengan bebas keluar masuk untuk mendapatkan pelayanan perpajakan yang baik sesuai dengan standar mutu pelayanan dan WP yang memerlukan pelayanan pada restricted area harus memenuhi syarat-syarat tertentu; b. Pegawai menjaga sopan santun dan perilaku, ramah (memberikan sapa, senyum, dan salam) kepada WP, tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit pelayanan; c. Apabila ada panggilan penting dan terpaksa harus meninggalkan WP, petugas memohon maaf kepada WP; d. Petugas konseling (<i>helpdesk</i>) siaga melayani pertanyaan WP; e. AR yang pada saat bersamaan menerima tamu yang merupakan WP tanggungjawab-bnya, maka WP lain ditangani oleh AR/petugas lain;	Ordinal

- f. Petugas pada KPP memiliki kemampuan bahasa Inggris untuk melayani WP Orang Asing;
- g. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi petugas memberikan informasi atau penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga WP dapat mengerti dengan baik;
- h. Terdapat petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan dengan sopan tamu atau WP untuk mengambil nomor antrian;
- i. Apabila antrian cukup panjang dan waktu menunggu lebih lama maka petugas harus memberikan penjelasan dengan baik, sopan dan tetap bersikap ramah;
- j. Apabila terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak atau terganggu yang mengakibatkan petugas tidak dapat melayani dengan baik, sehingga WP menjadi tidak sabar/marah, maka yang harus diperhatikan adalah petugas tetap bersikap ramah dan meminta maaf atas situasi tersebut;
- k. Bila Petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan/surat yang disampaikan WP, misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai WP memahami dengan baik.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri Nurmantu dalam Rahayu, 2010:138)	1. Kepatuhan Formal. 2. Kepatuhan Material.	Ordinal
---------------------------	--	--	---------

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) yang terdaftar Wajib SPT di KPP Pratama Bandung Bojonagara yang berjumlah 8.073 Wajib Pajak. Dengan menggunakan rumus slovin, maka diperoleh sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Bandung Bojonagara yang berjumlah 100 orang. Teknik sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

HASIL

Pengetahuan Perpajakan didapatkan jumlah skor total dari setiap pernyataan pada kuesioner sebesar 3994 atau sebesar 79,88% dari total skor ideal atau nilai indeks maksimum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergolong baik karena memiliki nilai persentase diantara 68%-84%. Pengetahuan perpajakan yang baik yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergambar melalui jawaban-jawaban responden

yang secara keseluruhan setuju dengan pernyataan-pernyataan pada kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat bahwa responden secara keseluruhan telah mengetahui kewajiban dan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, telah mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan, mengetahui persyaratan timbul dan hapusnya utang pajak, dan sebagainya.

Sosialisasi Perpajakan didapatkan jumlah skor total dari setiap pernyataan pada kuesioner sebesar 3699 atau sebesar 73,98% dari total skor ideal atau nilai indeks maksimum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergolong baik karena memiliki nilai persentase diantara 68%-84%. Sosialisasi perpajakan yang baik di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergambar melalui jawaban-jawaban responden yang secara keseluruhan setuju dengan pernyataan-pernyataan pada kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat bahwa sebagian besar responden telah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mereka mengikuti sosialisasi serta memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut yang dapat membuat responden atau Wajib Pajak menjadi paham mengenai aspek teknis perpajakan dan menjadi peduli serta sadar akan pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.

Pelayanan Fiskus didapatkan jumlah skor total dari setiap pernyataan pada kuesioner sebesar 5396

atau sebesar 83% dari total skor ideal atau nilai indeks maksimum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergolong baik karena memiliki nilai persentase diantara 68%-84%. Pelayanan fiskus yang baik di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergambar melalui jawaban-jawaban responden yang secara keseluruhan setuju bahkan sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan pada kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat bahwa pegawai atau petugas pajak (fiskus) yang melayani langsung Wajib Pajak menjaga sopan santun dan perilaku, ramah (memberikan sapa, senyum, dan salam), tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit pelayanan. Selain itu Wajib Pajak juga mendapatkan pelayanan dari petugas pajak (fiskus) mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat, petugas pajak (fiskus) baik petugas konseling (*helpdesk*) atau Account Representative (AR) siaga dalam melayani pertanyaan Wajib Pajak, dan sebagainya.

Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan jumlah skor total dari setiap pernyataan pada kuesioner sebesar 4486 atau sebesar 81,56% dari total skor ideal atau nilai indeks maksimum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergolong baik karena memiliki nilai persentase diantara 68%-84%. Kepatuhan Wajib Pajak yang baik di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergambar melalui jawaban-jawaban responden yang secara keseluruhan setuju bahkan sangat setuju dengan pernyataan-pernyataan pada kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat bahwa responden atau Wajib Pajak secara keseluruhan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dimana Wajib Pajak telah mendaftarkan diri pada KPP Pratama Bandung Bojonagara untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke KPP Pratama Bandung Bojonagara, melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP Pratama Bandung Bojonagara sebelum batas waktu, dan sebagainya.

Berdasarkan pengujian validitas bahwa setiap pernyataan pada kuesioner untuk variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus memiliki nilai r hitung lebih besar atau di atas 0,1946 (r hitung $>$ r tabel) sehingga dapat dikatakan bahwa setiap pernyataan pada kuesioner untuk setiap variabel adalah valid dan layak digunakan.

Berdasarkan pengujian reliabilitas untuk variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan Wajib Pajak masing-masing adalah sebesar 0,761, 0,768, 0,758, dan 0,753. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan kuesioner pada setiap variabel adalah reliabel atau

handal karena memiliki nilai Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,70 ($>$ 0,70).

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai Asymp. Sig. lebih besar dari 0.05 ($>$ 0,05) yaitu sebesar 0,200 yang artinya adalah data residual berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas didapatkan nilai tolerance untuk ketiga variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus adalah masing-masing sebesar 0,780, 0,638, dan 0,716 sedangkan untuk nilai VIF, ketiga variabel bebas tersebut memiliki nilai VIF masing-masing sebesar 1,282, 1,568, dan 1,397. Ketiga variabel bebas tersebut memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 ($>$ 0,10) dan memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 ($<$ 10), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas di dalam model regresi atau tidak terdapat korelasi antar variabel bebas di dalam model regresi.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot didapatkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	,646	,311			2,075	,041
Pengetahuan Perpajakan	,366	,082	,379		4,437	,000
Sosialisasi Perpajakan	,090	,087	,098		1,042	,300
Pelayanan Fiskus	,350	,085	,367		4,116	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang telah diolah penulis dengan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan didapatkan nilai konstanta sebesar 0,646 dan koefisien regresi sebesar 0,366 (β_1), 0,90 (β_2), dan 0,350 (β_3) sehingga terbentuk persamaan linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,646 + 0,366X_1 + 0,90X_2 + 0,350X_3 + e$$

Persamaan regresi linier berganda tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 0,646, nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan bernilai positif 0,366 menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki

maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai koefisien regresi variabel Sosialisasi Perpajakan bernilai positif 0,90 menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Sosialisasi Perpajakan maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus bernilai positif 0,350 menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Pelayanan Fiskus maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15,291	3	5,097	26,476	,000 ^b
	Residual	18,482	96	,193		
	Total	33,773	99			

Sumber: Data Primer yang telah diolah penulis dengan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan hasil uji statistik F didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) (Y) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,673 ^a	,453	,436	,43877

Sumber: Data Primer yang telah diolah penulis dengan SPSS 22 (2017)

Pada Tabel 4 didapatkan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,436 atau 43,6%. Hal tersebut menggambarkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 43,6% sedangkan sisanya sebesar 56,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B					
1	(Constant)	,646		,311		2,075	,041
	Pengetahuan Perpajakan	,366		,082	,379	4,437	,000
	Sosialisasi Perpajakan	,090		,087	,098	1,042	,300
	Pelayanan Fiskus	,350		,085	,367	4,116	,000

Sumber: Data Primer yang telah diolah penulis dengan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,300 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

Pelayanan Fiskus memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t), untuk variabel Pengetahuan Perpajakan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (<0,05) dan didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,366, sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima yang artinya Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel pengetahuan perpajakan didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden terhadap kuesioner sebesar 79,88%, yang artinya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara yang sebagian besar telah mengetahui kewajiban dan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan, mengetahui syarat timbul dan hapusnya utang pajak, dan sebagainya.

Dengan Wajib Pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, et al, 2015), dengan kata lain dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan mudah

bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Rahayu, 2010:29).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zuhdi, et al (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Murti, et al (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t), untuk variabel Sosialisasi Perpajakan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,300 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($>0,05$) dan didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,90, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya Sosialisasi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi atau baik Sosialisasi Perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonegara maka tidak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel sosialisasi perpajakan didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden terhadap kuesioner sebesar 73,98%, yang artinya sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonegara tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara yang sebagian besar telah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengikuti sosialisasi serta memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut. Namun, sosialisasi perpajakan yang baik belum tentu dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara. Hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak tidak dapat memahami dengan baik materi atau informasi perpajakan yang disampaikan oleh KPP dan karena materi atau informasi perpajakan tidak bersifat detail. Ketidakhahaman responden atau Wajib Pajak terhadap materi atau informasi perpajakan yang disampaikan dapat disebabkan karena jumlah Wajib Pajak yang mengikuti sosialisasi langsung tersebut cukup banyak sehingga materi atau informasi perpajakan yang disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik secara menyeluruh kepada para Wajib Pajak dengan kata lain sosialisasi tersebut tidak berjalan dengan efektif. Untuk sosialisasi tidak langsung, dapat disebabkan karena kegiatan sosialisasi tidak langsung relatif singkat serta materi dan informasi perpajakan yang disampaikan cenderung bersifat umum (tidak detail) dan mungkin saja media yang digunakan tidak sesuai dengan kajian atau kurang tepat untuk audience.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasari, et al (2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan penelitian yang dilakukan oleh Winerungan (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t), untuk variabel Pelayanan Fiskus didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$) dan didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0,350, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Pelayanan Fiskus secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Pelayanan Fiskus di KPP Pratama Bandung Bojonegara maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif dan digambarkan dengan garis kontinum, tergambar bahwa untuk variabel pelayanan fiskus didapatkan persentase jumlah skor total atas jawaban responden terhadap kuesioner sebesar 83%, yang artinya pelayanan fiskus di KPP Pratama Bandung Bojonegara tergolong baik. Hal tersebut dapat terlihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonegara yang sebagian besar setuju bahwa pegawai atau petugas pajak (fiskus) yang melayani langsung Wajib Pajak menjaga sopan santun dan perilaku, ramah (memberikan sapa, senyum, dan salam), tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit pelayanan. Selain itu Wajib Pajak juga mendapatkan pelayanan dari petugas pajak (fiskus) mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat, petugas pajak (fiskus) baik petugas konseling (helpdesk) atau Account Representative (AR) siaga dalam melayani pertanyaan Wajib Pajak, dan sebagainya.

Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan bila terdapat pelayanan yang baik oleh aparat perpajakan (Yuliasari, et al 2015). Dengan kata lain dengan adanya pelayanan bersifat prima atau pelayanan yang baik yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak dapat mencapai tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka Wajib Pajak cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rahayu, 2010:28).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliasari, et al (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Murti, et al (2014) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Suardana (2014) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non karyawan), sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara tergolong baik. Hal tersebut terlihat dari Wajib Pajak yang secara keseluruhan telah mengetahui kewajiban dan hak-haknya sebagai Wajib Pajak, mengetahui berapa besar tarif pajak yang dikenakan, mengetahui syarat timbul dan hapusnya utang pajak, dan sebagainya. Sebagian besar Wajib Pajak juga telah mengetahui adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Bojonagara dan Wajib Pajak mengikuti sosialisasi serta memperoleh informasi perpajakan melalui sosialisasi tersebut. Pelayanan yang baik di KPP Pratama Bandung Bojonagara terlihat dari pegawai atau petugas pajak (fiskus) di KPP yang menjaga sopan santun dan perilaku, ramah (memberikan sapa, senyum, dan salam), tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit pelayanan dalam melayani langsung Wajib Pajak, selain itu petugas pajak (fiskus) baik petugas konseling (*helpdesk*) atau Account Representative (AR) juga siaga dalam melayani pertanyaan Wajib Pajak, dan sebagainya. Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara secara keseluruhan telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti, Wajib Pajak telah mendaftarkan diri pada KPP Pratama Bandung Bojonagara untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menyampaikannya ke KPP Pratama Bandung Bojonagara, melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP Pratama Bandung Bojonagara sebelum batas waktu, dan sebagainya.

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara. Untuk pengujian hipotesis secara parsial, diperoleh bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah

yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara sedangkan sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M.C., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya.
- Andreas dan Savitri, Enni. 2015. *The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015) 163 – 169; 2nd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015.
- Dharma, Gede Pani Esa dan Suardana, Ketut Alit. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1; 2014; Hal. 340-353; ISSN 2302-8556.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2012, 4 Juli. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak [online].
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2016, 23 Maret. Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak [online].
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016, 4 Maret. Menkeu: Tax Ratio Indonesia di Bawah Standar [online].
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Murti, Hangga Wicaksono, et al. 2014. Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*; Vol.2 No. 3; September 2014; Hal. 389-398; ISSN 2303-1174.
- Oladipupo, Adesina Olugoke dan Obazee, Uyioghosa. 2016. *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria*. *iBusiness*, Vol.08 No.01 (2016), Article ID: 64130, 9 pages.
- Ortax. 2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima [online].
- Ortax. 2011. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak [online].
- Palil, Mohd Rizal, et al. 2013. *The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with*

- level of tax compliance: A Study the Influences of Religiosity. ASEAN Journal of Economics; Management and Accounting* 1 (1); 118-129 (June 2013); ISSN 2338-9710.
- Pratiwi, Lena. 2012 .Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Dan Niat, Dan Persepsi Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi Di Purwokerto [online].
- PRLM. 2013. 18 Desember. Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak Minim [online].
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Saad, Natrah. 2014. *Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109 (2014) 1069 – 1075; *2nd World Conference on Business, Economics and Management-WCBEM* 2013.
- Savitri, Enni dan Musfialdy. 2016. *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Pinalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (2016) 682-687; *3rd Global Conference on Business and Social Science-2015, GCBSS-2015*.
- Simanjuntak, Timbul H, dan Mukhlis, Imam. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*; Vol.1 No.3; September 2013; Hal. 960-970; ISSN 2303-1174.
- Yuliasari, Wirda Salisa, et al. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB)*; Vol. 4 No. 2.
- Zuhdi, Firdaus Aprian, et al. 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*; Vol. 7 No.1.

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA

Inne Aryanti
innearyanti132@gmail.com
Farida Titik Kristanti
Hendratno
Universitas Telkom

Abstract

The purpose of this research is to understand the influence of institutional ownership, managerial ownership, and audit quality for earnings management. The unit analysis in this research is the report of a finance company sub sector coal listed Indonesia Stock Exchange. The sampling technique of this research is used by purposive sampling and obtained 8 sub-sector coal companies in 2012-2015 to obtain 32 samples as observation material. Methods of data analysis in this research is panel data regression. The results showed that institutional ownership has no significant effect on earnings management, while managerial ownership influence significantly the negative direction and quality of the audit significant influence with a positive direction to earnings management so for investors should choose a company with a large managerial ownership and due attention to the quality of KAP being an independent auditor of a company that does not take the wrong investment decisions.

Keyword : *institutional ownership, managerial ownership, audit quality, earning management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 8 perusahaan sub sektor batubara tahun 2012-2015 sehingga didapat 32 sampel sebagai bahan observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif dan kualitas audit berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap manajemen laba sehingga investor dalam berinvestasi sebaiknya memilih perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang besar dan memperhatikan jasa KAP yang menjadi auditor independen suatu perusahaan agar tidak mengambil keputusan investasi yang keliru.

Kata Kunci : kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, manajemen laba

PENDAHULUAN

Saat ini, hampir di setiap perusahaan menerapkan pemisahan kerja antara pemegang saham (*principal*) dengan manajemen (agen) yang disebut Teori Agensi dimana manajemen sebagai pengelola yang menangani perusahaan secara langsung diyakini lebih mengetahui informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Kondisi demikian, dapat menyebabkan timbulnya konflik antara keduanya yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan, terutama mengenai masalah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Informasi mengenai kondisi perusahaan yang lebih banyak diketahui oleh manajemen inilah yang dapat memberi kesempatan kepada manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Tingkat laba sering kali menjadi target manajemen untuk mencapai tujuan tertentu karena laba sering digunakan oleh para pemegang saham sebagai indikator untuk menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan termotivasi untuk mengambil kebijakan akuntansi yang dapat berdampak pada perubahan angka laba dalam laporan keuangan yang sering disebut sebagai tindakan manajemen laba. Dengan tingkat laba yang besar pemegang saham akan menilai baik kinerja manajemen karena dianggap dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya dengan efektif dan efisien.

Menurut Sulistyanto (2014:51) manajemen laba adalah aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” dan mengintervensi laporan keuangan. Kasus manajemen laba akhir-akhir ini sering terjadi pada perusahaan sub sektor batubara yang sedang mengalami penurunan pertumbuhan kinerja dan penurunan harga semenjak tahun 2011. Sebagai contoh, pada tahun 2013 PT Garda Tujuh Buana Tbk dituding melakukan manipulasi laba dengan memasukkan penjualan lain-lain di dalam laporan keuangannya. Penjualan lain-lain ini belum tentu dibenarkan dalam standar pencatatan akuntansi karena tidak memiliki biaya dimana pembeli melakukan sendiri kegiatan penambangan batubara sehingga lebih tepat dicatat ke dalam pos pendapatan sewa. Selain itu, terjadi ketidaktepatan pengakuan pendapatan uang muka dimana uang muka diperuntukkan untuk penjualan selama 3 tahun sehingga perusahaan hanya boleh mencatat pendapatan untuk tahun yang bersangkutan.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan manajemen laba telah sering dilakukan. Namun terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Welvin dan Arleen (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan hasil penelitian Widyastuti (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian lain yang

dilakukan oleh Dian Agustia (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sementara penelitian Widyastuti (2009) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Rakhmadiy dan Lestari (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, namun penelitian Welvin dan Arleen (2010) dan Sudjatna dan Muid (2015) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut dan kasus manajemen laba yang terjadi di perusahaan sub sektor batubara, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, serta bagaimana variabel-variabel tersebut dalam perusahaan sub sektor batubara.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 23 perusahaan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015. (2) Perusahaan yang konsisten berada dalam sub sektor batubara di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. (3) Perusahaan sub sektor batubara yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2012-2015.

Dari kriteria sampel di atas, kemudian diperoleh 8 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dengan periode penelitian selama 4 tahun sehingga diperoleh 32 data observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan jumlah perhitungan mean, maksimal, minimal, dan standar deviasi. Sedangkan analisis regresi data panel yang dilakukan dengan melakukan tiga pengujian yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lefrange multiplier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi kepustakaan. Operasionalisasi variabel independen dan dependen dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

HASIL

Pengujian statistik deskriptif pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2. Nilai mean untuk kepemilikan

institusional (KI) adalah sebesar 49,535%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100% saham perusahaan sub sektor batubara, rata-rata hampir setengahnya dimiliki oleh pihak institusi. Nilai terbesar kepemilikan institusional selama periode penelitian adalah sebesar 70,718% dimiliki oleh HRUM, sedangkan nilai terkecilnya yaitu sebesar 26,000% dimiliki oleh BSSR.

Nilai mean kepemilikan institusional lebih besar dibandingkan standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa simpangan data besar yang berarti rendahnya fluktuasi data dari variabel kepemilikan institusional selama periode pengamatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel kepemilikan institusional dapat dikatakan baik karena memiliki sebaran yang rendah dan cenderung homogen (berkelompok).

Berdasarkan Tabel 2 untuk nilai mean kepemilikan manajerial (KM) adalah sebesar 21,145%. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pihak manajemen hanya memiliki sebagian kecil dari keseluruhan saham perusahaan sub sektor batubara yang beredar. Nilai terbesar kepemilikan manajerial selama periode penelitian adalah sebesar 66,650% dimiliki oleh BSSR, sedangkan nilai terkecilnya yaitu sebesar 0,010% dimiliki oleh HRUM.

Nilai mean kepemilikan manajerial lebih kecil dibandingkan standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa simpangan data kecil yang artinya besarnya fluktuasi data dari variabel kepemilikan manajerial selama periode pengamatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel kepemilikan manajerial dapat dikatakan memiliki sebaran yang tinggi dan cenderung heterogen (tidak berkelompok).

Selain itu, Tabel 2 juga menunjukkan bahwa nilai mean untuk kualitas audit (KA) adalah sebesar 0,656 atau dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah perusahaan sub sektor batubara menggunakan jasa KAP bigfour sebagai auditor independennya. Nilai terbesar 1 menunjukkan bahwa perusahaan yang diberikan angka 1 merupakan perusahaan yang menggunakan jasa KAP bigfour, sedangkan nilai terkecil 0 menunjukkan bahwa perusahaan yang diberi angka 0 adalah perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non bigfour*.

Nilai mean kualitas audit lebih besar dibandingkan standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa simpangan data besar yang berarti rendahnya fluktuasi data dari variabel kualitas audit selama periode pengamatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel kualitas audit dapat dikatakan baik karena memiliki sebaran yang rendah dan cenderung homogen (berkelompok).

Nilai mean untuk variabel manajemen laba adalah sebesar -0,112 yang menunjukkan bahwa perusahaan sub sektor batubara selama periode penelitian, rata-rata terindikasi melakukan tindakan manajemen laba dengan pola menurunkan angka laba karena menunjukkan nilai yang negatif. Untuk nilai terbesar dan terkecil yaitu

masing-masing senilai 0,147 dan -1,414 dimiliki oleh ITMG.

Nilai mean manajemen laba lebih kecil dibandingkan standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa simpangan data kecil yang artinya besarnya fluktuasi data dari variabel manajemen laba selama periode pengamatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel manajemen laba dapat dikatakan memiliki sebaran yang tinggi dan cenderung heterogen (tidak berkelompok).

Hasil Uji Chow (Uji Signifikansi Fixed Effect) ditunjukkan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil uji chow, diperoleh nilai (*cross section F*) dan (*cross section chi-square*) masing-masing bernilai 0,0014 dan 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau penelitian ini menggunakan model *fixed effect*. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk memilih model antara *fixed effect* atau *random effect* dengan menggunakan uji hausman.

Hasil Uji Hausman (Uji Signifikansi *Random Effect*) ditunjukkan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil uji hausman, nilai probabilitas (*cross section random*) sebesar $0,0000 < 0,05$, maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H_0 ditolak atau dengan kata lain regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect*. Maka model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect*.

Berdasarkan hasil uji signifikansi persamaan diketahui bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap manajemen laba perusahaan sub sektor batubara sebesar 61,65%, sedangkan sisanya 38,35% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Model *Fixed Effect* ditunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui nilai konstanta koefisien sehingga dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$\text{Manajemen Laba} = -0,857637 + 43,03438 \text{ KI} - 0,018684 \text{ KM} + 0,239758 \text{ KA} + e$$

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2203 yang lebih besar dari 0,05 maka H_{02} diterima artinya hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan, sehingga hipotesis bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial dengan arah negatif terhadap manajemen laba ditolak. Hal ini dikarenakan pada umumnya investor insitusi tidak menjalankan perannya secara efektif sebagai *sophisticated investors* yang dapat melakukan

pengawasan atau monitoring terhadap kinerja manajemen untuk membatasi manajemen dalam mengambil tindakan atau kebijakan yang akan berdampak pada tindakan manajemen laba. Investor institusi hanya menjalankan perannya sebagai transient investors (pemilik sementara perusahaan) yang justru hanya berfokus pada laba yang bersifat jangka pendek saja, sehingga adanya kepemilikan institusional belum tentu dapat meningkatkan monitoring secara efektif terhadap manajemen yang akan berpengaruh pada berkurangnya kebijakan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Welvin dan Arleen (2010), Dian Agustia (2013), Metta Kusumaningtyas (2012), Werner R Murhadi (2009) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0009 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_{03} ditolak artinya hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Koefisien regresi pada variabel kepemilikan manajerial bernilai negatif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kepemilikan manajerial maka manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar -0,018684. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah diajukan sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh secara parsial dengan arah negatif terhadap manajemen laba diterima. Atau dapat diartikan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka tindakan manajemen laba akan semakin berkurang atau sebaliknya. Dengan adanya kepemilikan manajerial akan membuat posisi manajemen sama dengan pemilik perusahaan yang dapat menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajemen dengan pemegang saham sehingga manajemen akan bertindak sama seperti investor pada umumnya dan tidak akan melakukan manajemen laba agar dapat mengetahui keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2009) bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Variabel kualitas audit memiliki probabilitas sebesar 0,0101 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_{04} ditolak artinya hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Koefisien regresi pada variabel kualitas audit bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kualitas audit maka manajemen laba akan mengalami peningkatan sebesar 0,239758. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan kerangka pemikiran yang dirumuskan bahwa kualitas audit berpengaruh secara parsial terhadap manajemen laba, namun dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi kualitas audit maka manajemen laba akan

semakin besar. Hal ini dapat disebabkan karena pada umumnya perusahaan menggunakan jasa KAP *bigfour* atau yang berkualitas tinggi hanya untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan agar dapat lebih dipercaya oleh investor namun belum dapat membatasi terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Sudjatna dan Muid (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini bisa disebabkan karena terdapat keterbatasan penelitian berupa proksi pengukuran kualitas audit yang hanya mengklasifikasikan berdasarkan ukuran KAP, serta keterbatasan jumlah objek yang menjadi sampel dalam penelitian.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, rata-rata kepemilikan institusional hampir mencapai setengah dari seluruh jumlah saham perusahaan sub sektor batubara yang beredar, sedangkan jumlah kepemilikan manajerialnya masih tergolong lebih kecil dari maksimal kepemilikan saham yang ditetapkan. Untuk kualitas audit, rata-rata perusahaan sub sektor batubara menggunakan jasa KAP *bigfour* sebagai auditor independen.

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dengan arah negatif dan kualitas audit berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial yang besar dan penggunaan KAP *non bigfour* dapat membatasi tindakan manajemen laba.

Untuk penelitian mendatang sebaiknya memperpanjang periode penelitian, menambahkan variabel independen lain untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba di industri yang berbeda. Bagi perusahaan, dalam menyusun laporan keuangan sebaiknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa memilih kebijakan akuntansi apapun yang dapat mempengaruhi nilai laba. Bagi investor sebagai pengguna laporan keuangan, berdasarkan hasil penelitian sebaiknya dalam berinvestasi memilih perusahaan dengan jumlah kepemilikan manajerial yang besar dan memperhatikan jasa KAP yang menjadi auditor independen suatu perusahaan agar tidak mengambil keputusan investasi yang keliru. Karena berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kepemilikan manajerial yang besar dan kualitas audit dapat berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan manajemen laba, terutama pada perusahaan sub sektor batubara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Dian. 2013. Pengaruh *Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage* Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 15(1). 27-42. ISSN 2338-8137.
- Agustia, Dian. 2013. Pengaruh *Free Cash Flow* dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Akrual Jurnal Akuntansi*. 4(2). 105-118. e-ISSN 2502-6380.
- Kusumaningtyas, Metta. 2012. Pengaruh Independensi Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Prestasi*. 9(1). ISSN: 1411-1497.
- Murhadi, R Werner 2009. *Good Corporate Governance and Earning Management Practices: An Indonesian Cases*. *Jurnal Universitas Surabaya Indonesia SSRN*.
- Rakhmadiaz, Randy dan Nanik, Lestari. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal 3rd Applied Business and Engineering Conference*. ISSN 2339-2053.
- Sudjatna, Indiferent dan Dul Muid. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Keaktifan Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*. 4(4). ISSN 2337-3806.
- Sulistiyanto, H Sri. 2014. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Welvin, I Guna dan Arleen, Herawaty. 2010. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance, Independensi Auditor*, Kualitas Audit, dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 36(1). 39-52. ISSN 1410-9875.
- Widyastuti, Tri. 2007. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba dan Dampaknya pada *Return Saham*. *Jurnal Akuntabilitas*. 7(1). 38-44. ISSN 1412-0240.
- Widyastuti, Tri. 2009. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Maksi*. 9(1). 30-41. ISSN 1412-6680.
- <http://www.bisnis.com>
<http://www.bi.go.id>
<http://www.finance.detik.com>
<http://www.antaranews.com>

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kepemilikan Institusional (X_1)	$\frac{\text{jumlah saham institusional}}{\text{total saham beredar}} \times 100\%$	Rasio
Kepemilikan Manajerial (X_2)	$\frac{\text{jumlah saham manajer}}{\text{total saham beredar}} \times 100\%$	Rasio
Kualitas Audit (X_3)	KAP Big Four = 1 KAP non Big Four = 0	Nominal
Manajemen Laba (Y)	$DTA_{i,t} = \frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} - NDTA_{i,t}$	Rasio

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif 2012-2015

	KI	KM	KA	ML
Mean	49.535	21.145	0.656	-0.112
Maximum	70.718	66.650	1.000	0.147
Minimum	26.000	0.010	0.000	-1.414
Std. Dev	16.213	27.250	0.483	0.269
Observations	32	32	32	32

Sumber: data diolah

Tabel 3. Hasil Uji Chow (Uji Signifikansi *Fixed Effect*)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.243581	(7,21)	0.0014
Cross-section Chi-square	32.346320	7	0.0000

Sumber: data diolah

Tabel 4. Hasil Uji Hausman (Uji Signifikansi *Random Effect*)

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.709989	3	0.0000

Sumber: data diolah

Tabel 5. Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.857637	0.778853	-1.101153	0.2833
KA	0.239758	0.084780	2.827993	0.0101
KI	43.03438	34.06569	1.263276	0.2203
KM	-0.018684	0.004818	-3.878317	0.0009

Sumber: data diolah

PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA

Hermawati Nurciptaning Arum

hermawatiarum1912@gmail.com

Mohamad Rafki Nazar

Wiwin Aminah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Abstract

Income smoothing is strategy where management increases or decreases profits to reduce fluctuation. Income smoothing is common form of profit management. Income smoothing measured using Eckel Index which can distinguish between companies that did and did not undertake income smoothing. Eckel uses CV for profit and net income. Index which has a result less than 1 is classified as a grader, index which has a result more than 1 is classified as non-grader. This study aims to determine the effect of profitability, firm size, and value of company on income smoothing. The object using company registered in Jakarta Islamic Index 2011-2015. Sampling technique used in this study is purposive sampling. Analytical method used in this study is logistic regression. The results show that profitability, company size, and value of company simultaneously influence income smoothing. Partially, profitability and company size significantly negative direction of income smoothing, the value of the company have significant influence with a positive direction toward the practice of income smoothing.

Keywords : *profitability, firm size, value of firm, income smoothing*

Abstrak

Perataan laba adalah sebuah strategi manajemen meningkatkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasinya Perataan laba adalah bentuk umum dari manajemen laba. Perataan laba diukur dengan Indeks Eckel yang dapat membedakan antara perusahaan melakukan perataan laba dan tidak melakukan. Eckel menggunakan CV untuk laba dan pendapatan bersih. Indeks yang memiliki hasil <1 maka digolongkan sebagai perata, sedangkan indeks yang memiliki hasil >1 digolongkan sebagai bukan perata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan terhadap perataan laba, penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015 dengan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan metode analisis regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Secara parsial profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba, sedangkan nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba.

Kata Kunci : *profitabilitas, ukuran perusahaan, nilai perusahaan, perataan laba*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan catatan ringkas yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu yang merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang diberikan oleh pemilik (Putri dan Yuyetta, 2013). Laporan keuangan juga merupakan cermin dari suatu kondisi perusahaan, karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa pihak, yaitu: manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah, karyawan perusahaan, pemasok, konsumen, dan masyarakat umum lainnya yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar yaitu pihak eksternal dan pihak internal (Hery, 2015).

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Laba beserta komponennya yang terdapat dalam pelaporan keuangan dapat menunjukkan informasi suatu entitas bisnis mengenai prestasi yang diraihnya. Laba yang dilaporkan merupakan informasi yang berharga bagi pihak internal dan eksternal. Informasi laba dalam laporan keuangan bertujuan untuk menaksir risiko investasi atau meminjamkan dana, membantu mengestimasi kemampuan laba, dan menilai kinerja manajemen (Marpaung dan Latrini, 2014). Hal ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (IAI, 2015) yang menyatakan bahwa informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan.

Informasi yang terkandung dalam laba bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari manajemen apakah baik atau tidak, membantu memprediksi hasil laba di masa datang, dan memprediksi kemampuan perusahaan meminjam dana kepada investor. Perhatian investor seringkali terpusat pada laba sehingga hal tersebut membuat manajemen terdorong untuk melakukan perilaku yang tidak semestinya (*dysfunctional behavior*). Pada umumnya, perhatian para pemakai laporan keuangan hanya berfokus pada laba yang terdapat dalam laporan laba rugi untuk menilai kinerja sebuah perusahaan yang digunakan untuk mengambil keputusan, oleh karena itu, manajemen menyadari hal ini dan cenderung melakukan manajemen laba. (Peranasari dan Dharmadiaksa, 2014).

Subramanyam dan Wild (2013) menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis manajemen laba. (1) Manajer meningkatkan laba (*increasing income*) periode kini. (2) Manajer melakukan "mandi besar" (*big bath*) melalui pengurangan laba periode ini. (3) Manajer mengurangi fluktuasi laba dengan perataan laba (*income smoothing*). Seringkali manajer melakukan satu atau kombinasi dari ketiga strategi ini pada waktu yang berbeda untuk mencapai tujuan manajemen laba

jangka panjang. Manajemen laba merupakan perilaku yang tidak semestinya dari manajemen. Bentuk dari manajemen laba yang kerap dilakukan oleh manajer adalah perataan laba.

Perataan laba adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan (Riahi dan Belkaoui, 2007). Perataan laba juga merupakan bentuk rekayasa pendapatan yang dirancang untuk menghilangkan fluktuasi sederetan pendapatan (Mulford dan Comiskey, 2010). Wulandari, Arfan, dan Shabri (2013) menyatakan bahwa perataan laba dilakukan terutama untuk menunjukkan kinerja perusahaan dan keadaan keuangan. Tujuan yang melatarbelakangi manajemen melakukan perataan laba tetap saja dapat mengubah kandungan informasi atas laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini perlu diwaspadai oleh pengguna laporan keuangan karena informasi yang telah mengalami penambahan atau pengurangan tersebut dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

Terdapat beberapa alasan yang membuat manajemen melakukan perataan laba yaitu untuk memenuhi target internal, memenuhi harapan pihak eksternal, membuat laba stabil, dan agar laporan keuangan seolah-olah nampak baik demi kepentingan perusahaan (Hery, 2015). Perataan laba dianggap sebagai kecurangan karena manajemen melakukan perubahan terhadap akun dalam laporan keuangan yang dilakukan secara sadar, dimana informasi yang dihasilkan dapat mengelabui investor dan pemegang saham mengenai kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya. Yayasan Pendidikan Internal Audit dalam buku yang berjudul *Fraud Auditing* (2008) menyatakan bahwa kecurangan yang dilakukan oleh manajemen biasanya dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi atau untuk perusahaan. Untuk menarik investor, manajemen merakayasa laporan keuangannya yang tidak baik menjadi seolah-olah menguntungkan. Yang menjadi korban akibat perilaku tersebut adalah publik investor. Hal tersebut dapat merugikan stakeholder perusahaan. Kecurangan ini termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih.

Perataan laba yang belum lama terjadi yaitu kasus manipulasi laba Toshiba. Tim penyelidik independen menemukan bahwa direktur utama Toshiba mengetahui bahwa perusahaan memanipulasi laporan keuntungan dengan nilai US\$1,2 miliar selama beberapa tahun. Laporan oleh akuntan independen dengan pengacara menyatakan bahwa laba operasional Toshiba telah dibesar-besarkan sebesar US\$1,22 miliar dari tahun 2008 hingga 2015. Menurut penyelidikan yang dilakukan, hal tersebut terjadi karena adanya tekanan divisi bisnis untuk memenuhi target laba yang sulit, toshiba melebih-lebihkan laba dan menunda laporan kerugian. (www.bisnis.liputan6.com)

Kasus mengenai perataan laba lainnya juga

dilakukan oleh PT Ancora Resource (OKAS). Ancora Mining Services dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) atas tuduhan dugaan penyelewengan pajak. Dugaan manipulasi tersebut dilakukan pada neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal yang berakhir pada 31 Desember 2008. (www.okezone.com).

Selain praktik perataan laba yang dilakukan oleh Toshiba dan PT. Ancora Resources Tbk (OKAS), praktik perataan laba juga dilakukan oleh PT. Timah (Persero) Tbk (TINS). Ikatan Karyawan Timah (IKT) menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan publik melalui media. Contohnya adalah pada saat press release laporan keuangan semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang ada telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada semester I-2015 laba operasi rugi sebesar Rp59 miliar (www.okezone.com).

Biasanya perataan laba terjadi karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. Manajemen terdorong untuk melakukan perataan laba karena manajemen berupaya untuk meningkatkan penjualan saham, menurunkan tingkat pajak, dan mendapatkan bonus. Perataan laba telah banyak digunakan sebagai topik penelitian-penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa ukuran yang dipakai untuk mendeteksi faktor-faktor yang mendorong manajemen melakukan praktik perataan laba berdasarkan penelitian sebelumnya, antara lain profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, risiko keuangan, *net profit margin*, *total debt to total asset*, *debt to equity ratio*, *good corporate governance*, konservatisme akuntansi, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, nilai perusahaan, kepemilikan manajemen, dan *agency cost*. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Dasar pemilihan variabel-variabel tersebut karena pada penelitian-penelitian terdahulu masih banyak terdapat inkonsistensi yang ada dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu penulis memilih variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan untuk memperkuat hasil penelitian mengenai perataan laba yang telah dilakukan sebelumnya.

Alasan dipilihnya Jakarta Islamic Index sebagai objek penelitian adalah karena perataan laba dianggap sebagai hal yang negatif karena informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan tidak menunjukkan informasi yang sesungguhnya. Hal tersebut merupakan perilaku yang tidak semestinya dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui apakah masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dalam perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dimana saham-sahamnya telah memenuhi kriteria syariah Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan terhadap praktik perataan laba

secara simultan dan parsial pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik, artinya perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam menghasilkan laba bersih baik dari hasil penjualan maupun modal sendiri (Widana dan Yasa, 2013).

Penelitian ini menggunakan *return on asset* (ROA) sebagai rasio pengukurannya. ROA diukur dengan cara perbandingan antara laba bersih dengan total aset. ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan kedalam bentuk total aktiva untuk menghasilkan laba.

Semakin tinggi nilai profitabilitas maka perusahaan akan cenderung melakukan perataan laba karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi mencerminkan kinerja perusahaan yang baik sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Penelitian Peranasari dan Dharmadiaksa (2014), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba dan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sujana (2014), juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hipotesis yang diajukan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perataan laba. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba karena perusahaan yang berukuran besar biasanya menjadi subjek pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah maupun masyarakat umum. Perusahaan besar diperkirakan menghindari fluktuasi laba yang drastis karena akan menyebabkan pajak perusahaan meningkat begitu pula sebaliknya (Supriastuti, 2015).

Penelitian Peranasari dan Dharmadiaksa (2014), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba dan penelitian yang dilakukan oleh Widana dan Yasa (2013), juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Hipotesis yang diajukan, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba.

Nilai perusahaan yang baik membentuk citra perusahaan yang baik bagi investor sehingga investor cenderung membeli saham pada perusahaan dengan nilai pasar yang baik (Peranasari dan Dharmadiaksa, 2014). Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi akan cenderung melakukan praktik perataan laba. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan dengan nilai yang tinggi memiliki tingkat kestabilan laba yang tinggi pula sehingga dapat lebih menarik investor untuk

menanamkan modal pada perusahaan tersebut.

Penelitian Peranasari dan Dharmadiaksa (2014), menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba dan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2012), juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hipotesis yang diajukan, nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba.

METODE

Populasi yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria-kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2011 – 2015	30
2.	Perusahaan yang terdaftar secara tidak konsisten di Jakarta Islamic Index selama periode pengamatan 2011 – 2015	(19)
3.	Perusahaan di JII yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang sudah di audit selama periode pengamatan 2011 – 2015 di website BEI.	0
Total		11
Jumlah pengamatan selama 5 tahun		55

Berdasarkan Tabel 1 dihasilkan sampel penelitian sebanyak 11 perusahaan dan jumlah pengamatan selama 5 tahun sehingga didapatkan 55 jumlah data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi logistik. Operasionalisasi variabel ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabel Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Profitabilitas	Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Widana dan Yasa, 2013)	$ROA = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$	Rasio
Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan dicerminkan dari volume penjualan sebagai aktivitas bisnis perusahaan yang sesungguhnya (Subramanyam dan Wild, 2010)	$\text{Ukuran perusahaan} = \log(\text{total penjualan})$	Rasio
Nilai Perusahaan	Perbandingan antara nilai saham dengan nilai buku saham perusahaan (Harmono, 2009).	$\text{Price to Book Value} = \frac{\text{harga saham}}{\text{nilai buku saham biasa}}$	Rasio
Perataan Laba	Strategi dimana manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya (Subramanyam dan Wild, 2013)	$\text{Indeks Eckel} = \frac{CV\Delta EAT}{CV\Delta S}$	Nominal

HASIL

Tabel 3. Distribusi Sampel Berdasarkan Perataan Laba

Kategori	2011	2012	2013	2014	2015	Total	Presentase
Smoother	6	7	4	3	8	28	50,91%
Non-smoother	5	4	7	8	3	27	49,09%
Total	11	11	11	11	11	55	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dapat dilihat bahwa dari total sampel penelitian yang berjumlah 55 sampel penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 28 sampel atau 50,91% perusahaan melakukan perataan laba. Sementara itu sisanya sebanyak 27 sampel penelitian atau 49,09% tidak melakukan perataan laba. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Jakarta Islamic Index masih terdapat perusahaan yang melakukan praktik perataan laba untuk menciptakan laporan keuangan yang terkesan stabil labanya di mata investor.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Independen

	ROA	LN PENJUALAN	PBV
N	55	55	55
Minimum	2,48	7,23	0,88
Maximum	41,50	12,21	82,13
Mean	15,37	9,88	9,07
Std. Deviation	9,49	1,23	20,23

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari data tersebut tersebut dapat dilihat bahwa, variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA dan variabel ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total penjualan memiliki nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi yang dapat diartikan bahwa data variabel tersebut berkelompok atau tidak bervariasi. Sedangkan, variabel nilai perusahaan yang diproksikan dengan *price to book value*

memiliki mean yang lebih kecil dari standar deviasi yang dapat diartikan bahwa data variabel tersebut tidak berkelompok atau bervariasi.

Tabel 5. Hasil Pengujian Overall Model Fit

Block Number	-2 log likelihood
0	76,228
1	60,886

Sumber: Output SPSS 20

Penurunan nilai antara 2LogL pada langkah awal dengan 2LogL pada langkah berikutnya menunjukkan model regresi yang semakin baik. Sehingga model regresi logistik ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Nilai -2 LogL pada regresi logistik mirip dengan pengertian ‘*Sum of Square Error*’ pada model regresi. Sehingga penurunan nilai -2 LogL menunjukkan model yang semakin baik.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Model Summary			
Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	60,886a	,243	,325

Sumber: Output SPSS 20

Hasil pengujian koefisien determinasi Tabel 6 ditunjukkan dengan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,325. Nilai *Nagelkerke R Square* yang sebesar 0,325 atau 32,5% menunjukkan bahwa variabel independen yang berupa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan mempengaruhi variabel dependen yaitu praktik perataan laba sebesar 32,5% sementara sisanya sebesar 67,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Tabel 7. Omnibus Tests of Model Coefficients

Step	Step	Chi-square	Df	Sig.
Step 1	Step	15,342	3	,002
	Block	15,342	3	,002
	Model	15,342	3	,002

Sumber: Output SPSS 20

Dari hasil Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Chi-Square* yang diperoleh adalah sebesar 15,342 dengan *degree of freedom* = 3. Tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah 0,002, berarti secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan memiliki pengaruh terhadap perataan laba.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 4, nilai ROA tertinggi sebesar 41,50% dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang menunjukkan kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba atas aktiva yang digunakan adalah sebesar 41,50%. Nilai ROA terendah dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) yaitu sebesar 2,48%. Artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang digunakan adalah sebesar 2,48%, hal tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan yang cukup signifikan sehingga laba tahun berjalan juga ikut menurun secara signifikan.

Nilai logaritma natural ukuran perusahaan terendah yaitu sebesar 7,23 dimiliki oleh PT. Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) pada tahun 2011 dan nilai logaritma natural ukuran perusahaan tertinggi yaitu sebesar 12,21 dimiliki oleh PT. Astra International Tbk (ASII) pada tahun 2014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PT. Astra International Tbk (ASII) termasuk ke dalam kategori perusahaan besar dan PT. Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) termasuk ke dalam kategori perusahaan kecil yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2011-2015.

Nilai *price to book value* variabel nilai perusahaan terendah yaitu sebesar 0,88 dimiliki oleh PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dengan nilai harga saham sebesar Rp720 per lembar saham, total ekuitas sebesar Rp18.917 (dalam miliaran rupiah), saham beredar sebesar Rp23.078 (dalam miliaran rupiah) dan nilai book value sebesar 0,82 pada tahun 2015. Sementara itu nilai *price to book value* variabel nilai perusahaan tertinggi yaitu sebesar 82,13 dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dengan nilai harga saham sebesar Rp39.625 per lembar saham, total ekuitas sebesar Rp4.827 (dalam miliaran rupiah), saham beredar sebesar Rp7.630 (dalam miliaran rupiah) dan nilai *book value* sebesar 632,63 pada tahun 2011.

Koefisien regresi β_1 -0,149 dengan nilai signifikansi 0,011 menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap perataan laba. Karena analisis regresi logistik tidak bisa diinterpretasikan langsung dengan hanya melihat nilai koefisien regresi, maka dari itu dilihat dari hasil eksponen B bahwa nilai yang dihasilkan adalah 0,861, nilai tersebut lebih kecil dari 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel profitabilitas maka perusahaan cenderung tidak melakukan perataan laba.

Koefisien regresi β_2 -0,552 dengan nilai signifikansi 0,044 yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap perataan laba. Karena analisis regresi logistik tidak bisa diinterpretasikan langsung dengan hanya melihat nilai koefisien regresi, maka dari itu dilihat dari hasil eksponen B bahwa nilai yang dihasilkan adalah 0,576, nilai tersebut lebih kecil dari 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung tidak melakukan perataan laba.

Koefisien regresi β_3 0,052 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan memiliki pengaruh secara signifikan dengan arah positif

Tabel 9. Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
							Lower	Upper
ROA	-,149	,059	6,467	1	,011	,861	,768	,966
UP	-,552	,273	4,075	1	,044	,576	,337	,984
PBV	,052	,026	3,874	1	,049	1,053	1,000	1,108
Constant	7,404	2,913	6,460	1	,011	1643,224		

Output: SPSS 20

terhadap perataan laba. Karena analisis regresi logistik tidak bisa diinterpretasikan langsung dengan hanya melihat nilai koefisien regresi, maka dari itu dilihat dari hasil eksponen B bahwa nilai yang dihasilkan adalah 1,053, nilai tersebut lebih besar dari 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel nilai perusahaan maka perusahaan akan cenderung melakukan perataan laba.

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on aset* (ROA). Tabel 9 menunjukkan bahwa koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,149 dengan nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut signifikan namun tidak mendukung hipotesis yang dikemukakan karena arah yang dihasilkan negatif.

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diprosikan dengan menggunakan logaritma natural total penjualan. Tabel 9 menunjukkan bahwa koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar -0,552 dengan tingkat signifikansi 0,044 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut signifikan namun tidak mendukung hipotesis yang dikemukakan karena arah yang dihasilkan negatif.

Dalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan menggunakan *price to book value*. Tabel 9 menunjukkan bahwa koefisien regresi PBV sebesar 0,052 dengan nilai signifikansi 0,049 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hasil tersebut signifikan namun dan mendukung hipotesis yang dikemukakan karena arah yang dihasilkan positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji statistik deskriptif mengenai profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan terhadap praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015 maka diperoleh hasil sebagai berikut: (a) Dari 55 jumlah sampel perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index sebanyak 28 perusahaan atau 50,91% unit sampel melakukan perataan laba sedangkan sisanya sebanyak 27 perusahaan atau sebesar 49,09% unit sampel tidak melakukan perataan laba, (b) Profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama tahun 2011-2015 memiliki nilai rata-rata profitabilitas sebesar 15,36633% dengan nilai standar deviasi sebesar 9,49030%. Dari total 55 sampel penelitian terdapat 23 sampel memiliki nilai diatas rata-

rata dengan 11 sampel tergolong *smoother* dan sisanya sebanyak 12 sampel tergolong *non-smoother*. Sementara itu sebanyak 32 sampel dibawah rata-rata dimana 17 sampel tergolong *smoother* dan sisanya sebanyak 15 sampel tergolong *non-smoother*, (c) Ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015 memiliki nilai rata-rata logaritma natural sebesar 9,87569 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,23047. Dari total 55 sampel penelitian terdapat 25 sampel yang memiliki nilai rata-rata diatas rata-rata dengan 10 sampel tergolong *smoother* dan sisanya 15 sampel tergolong *non-smoother*. Sementara itu sebanyak 30 sampel dibawah rata-rata dengan 18 sampel tergolong *smoother* dan sisanya sebanyak 12 sampel tergolong *non-smoother*, (d) Nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015 memiliki nilai rata-rata PBV sebesar 9,06963 dengan nilai standar deviasi sebesar 20,22630. Dari total 55 sampel penelitian terdapat 6 sampel yang memiliki nilai rata-rata diatas rata-rata dengan 1 sampel tergolong *smoother* dan sisanya 5 sampel tergolong *non-smoother*. Sementara itu sebanyak 49 sampel dibawah rata-rata dengan 27 sampel tergolong *smoother* dan sisanya sebanyak 22 sampel tergolong *non-smoother*.

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik menggunakan *Omnibus Test of Model Coefficients* diketahui bahwa secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan memiliki pengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015.

Berdasarkan hasil pengujian dan ukuran perusahaan secara parsial diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan, sedangkan nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015.

DAFTAR PUSATAKA

- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2007. *Accounting Theory* (Buku 2). Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, Made Yustiari & Sujana, I Ketut. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Pada Praktik Perataan Laba Dengan Jenis Industri Sebagai Variabel Pemoderasi di Bursa Efek Indonesia. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*. (ISSN: 2302 – 8556).

- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta: CAPS.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan Edisi 2015. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Marpaung, c.o., & Latrini, Y 2014. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Pada Perataan Laba. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2, 279-289.
- Mulford, Charless W. dan Comiskey, Eugene E. 2010. Deteksi Kecurangan Akuntansi. Jakarta: PPM.
- Peranasari, I. A., & Dharmadiaksa, I. B. 2014. Pelaku *Income Smoothing*, Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.1, 140-153.
- Putri, Noviantara Dwi & Yuyetta, Etna Nur Afri. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. E-Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro Vol 2. ISSN: 2337-3806
- Subramanyam, K. R., & Wild, J.J. 2013. *Financial Statement Analysis*. Analisis Laporan Keuangan. (D. Yanti, Trans.) Jakarta: Salemba Empat.
- Warnanti, S.S.A., 2015. Ukuran Perusahaan, *Winner/Loser Stock, Debt to Equity Ratio, Dividend Payout Ratio* Pengaruh Terhadap Perataan Laba. Paradigma, 13(01), pp.45-62.
- Widana, N. and Ari, I.N., 2013. Perataan laba serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 3(2), pp.297-317.
- Wulandari, S., Arfan, M., & Shabri, M. 2013. Pengaruh Profitabilitas, *Operating Profit Margin (OPM)*, Dan *Financial Leverage* Terhadap Perataan Laba (*Income Smoothing*) Pada Perusahaan Blue Chips Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2011). Jurnal Akuntansi PascaSarjana Universitas Syiah Kuala, 2, 44-55.
- Yayasan Pendidikan Internal Audit. *Fraud Auditing*. 2008

Tabel 8. Tingkat Profitabilitas, Nilai Perusahaan dan Ukuran Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015 (dalam miliaran rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	PROFITABILITAS	UKURAN PERUSAHAAN	NILAI PERUSAHAAN
			ROA	Ln TOTAL PENJUALAN	PBV
1.	AALI	2011	24,4806	9,28480	3,10290
		2012	20,29149	9,35565	2,79178
		2013	12,71804	9,44739	2,54601
		2014	14,12329	9,69929	2,20875
		2015	3,230755	9,47723	2,23481
2.	ASII	2011	13,65807	11,99883	4,29727
		2012	12,47682	12,14448	3,62857
		2013	10,41945	12,17499	3,06905
		2014	9,373848	12,21454	2,70849
		2015	6,361358	12,12376	2,57558
3.	ASRI	2011	10,03829	7,23056	2,37148
		2012	11,10908	7,80221	1,39673
		2013	6,16163	8,21175	1,36349
		2014	6,948712	8,20001	1,14113
		2015	3,655799	7,93164	1,10120
4.	INTP	2011	19,84464	9,53878	3,45664
		2012	20,93166	9,75788	2,80070
		2013	18,83715	9,83580	2,36691
		2014	18,25861	9,90329	2,19434
		2015	15,76453	9,78684	2,27884
5.	KLBF	2011	18,40706	9,29762	2,32235
		2012	18,84689	9,52047	10,26346
		2013	17,41052	9,68047	8,21691
		2014	17,07042	9,76244	7,11457
		2015	15,02629	9,79183	6,38542

6.	LSIP	2011	25,05889	8,45233	1,96896
		2012	14,77754	8,34569	1,83069
		2013	9,630094	8,32700	1,79833
		2014	10,59503	8,46105	1,64169
		2015	7,040344	8,34046	1,56674
7.	LPKR	2011	5,3946	8,34046	1,76599
		2012	6,341228	8,72583	1,44866
		2013	5,086262	8,80478	1,17280
		2014	8,302217	9,36349	0,94297
		2015	2,477799	9,09493	0,87837
8.	SMGR	2011	20,11494	9,70376	3,50075
		2012	18,53719	9,88318	2,81660
		2013	17,38763	10,10647	2,35224
		2014	16,48025	10,20311	2,04613
		2015	11,86014	10,20166	1,86449
9.	TLKM	2011	15,01155	11,17399	1,31246
		2012	16,48753	11,25342	1,19495
		2013	15,85763	11,32620	5,16863
		2014	15,22126	11,40418	4,64646
		2015	14,03176	11,53733	4,28326
10.	UNTR	2011	12,70457	10,91605	2,90220
		2012	11,43715	10,93229	2,47127
		2013	8,366166	10,83982	2,23911
		2014	8,027599	10,88072	2,06916
		2015	4,563956	10,80663	2,03368
11.	UNVR	2011	39,72524	10,06344	82,13495
		2012	40,37547	10,21475	76,19424
		2013	40,10339	10,33378	74,32123
		2014	41,5027	10,44906	63,69049
		2015	37,2028	10,50463	62,63492

INTANGIBLE ASSET, PROFITABILITAS, DAN SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

Annisa Marwa

annisamarwa15@gmail.com

Deannes Isynuwardhana

Annisa Nurbaiti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Abstract

Sri-Kehati Index has been increased since 2009, though return on equity has decreased. Stock price will be affected by the ROE so that the value of the firm also decreases. In this study, the independent variables are intangible assets, profitability, and sustainability report. The dependent variable is the value of the firm. This study aims to determine the effect of intangible assets, profitability, and sustainability report on the value of the firm in a company registered in Sri-Kehati Index Indonesia Stock Exchange. The population are all companies registered in Sri-Kehati Index in the period of 2009- 2014, while the sample is determined by purposive sampling method so as to obtain 5 companies. The analytical method used is the panel data regression analysis. The results show intangible assets, profitability, and sustainability report simultaneously significant effect on value of the firm. While partially intangible asset has significant negative effect and profitability has significant positive effect on value of the firm.

Keywords : *intangible asset, profitability, sustainability report, value of the firm*

Abstrak

Pertumbuhan Indeks Sri-Kehati terus meningkat dibentuk tahun 2009, sedangkan *return on equity* ROE cenderung menurun. Seharusnya, harga saham akan terpengaruh oleh ROE sehingga nilai pasar perusahaan juga menurun. Dalam penelitian ini variabel independen adalah *intangible asset*, profitabilitas, dan *sustainability report*, sedangkan variabel dependen adalah nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *intangible asset*, profitabilitas, dan *sustainability report* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati Bursa Efek Indonesia. Populasi adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati periode 2009–2014, sedangkan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu 5 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan *intangible asset*, profitabilitas, dan *sustainability report* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara parsial *intangible asset* berpengaruh signifikan negatif dan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : *intangible asset, profitabilitas, sustainability report, nilai perusahaan*

PENDAHULUAN

Indeks Sri-Kehati adalah kumpulan dari saham-saham yang fokus utamanya tidak hanya memperoleh keuntungan namun juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pergerakan indeks saham Sri-Kehati mengalami fluktuasi yang meningkat sejak diterbitkan pada tahun 2009, artinya nilai perusahaan yang terdaftar pada indeks Sri-Kehati juga mengalami peningkatan. Berikut merupakan grafik perkembangan harga saham penutupan (closing price) dan ROE pada Indeks Sri-Kehati periode 2009 -2014.

Berdasarkan faktor fundamental perusahaan (www.sahamok.com), hal yang terjadi pada indeks Sri-Kehati pada gambar 1 *return on equity* cenderung menurun. Artinya perusahaan memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham baik secara langsung atau dengan laba yang telah ditahan cenderung menurun tiap tahunnya selama periode 2009-2014. Sedangkan realita yang terjadi pada harga pasar saham pada indeks Sri-Kehati terus meningkat. Seharusnya, harga saham akan terpengaruh oleh *return on equity* sehingga nilai perusahaan juga ikut menurun. Berdasarkan gambar 1 tersebut menunjukkan fenomena bahwa harga saham cenderung meningkat sehingga nilai perusahaan dapat dikatakan meningkat tanpa diikuti pertumbuhan positif *return in equity* selama periode 2009-2014.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, salah satunya *Intangible Asset*. Pada tahun 2000-an, nilai *Intangible Asset* mendominasi nilai pasar perusahaan di pasar modal Amerika, yaitu bernilai sekitar 80% dari nilai pasar perusahaan (Sullivan, 2000). Di Inggris, besarnya nilai aset tidak berwujud adalah 60% dari nilai pasar perusahaan (Pricewaterhouse Coopers, 2004) dalam Soraya dan Syafruddin (2013). Di Asia, perkembangan nilai aset tidak berwujud juga memiliki tren positif termasuk di negara Indonesia. Aset tidak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum aset tidak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik (Mawikere, Florence Katthy Jantje J. Tinangon, 2016). *Intangible asset* juga dikenal dengan *intellectual assets*, *intellectual capital*, *intellectual property*, atau *knowledge capital* (Erawati dan Sudana, 2009). Dalam penelitian ini *intangible asset* yang dimaksud adalah *intellectual capital* yang diprosikan menggunakan model VAICTM. Terdapat perbedaan penelitian sebelumnya mengenai aset tidak berwujud yaitu pengelolaan aset tidak berwujud yang semakin baik akan meningkatkan nilai perusahaan (Widhiastuti, Ni Luh, 2015). Hasil yang berbeda ditemukan oleh Yuniasih (2010) dalam penelitian menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Selain aset tidak berwujud (*Intangible Asset*), faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah

profitabilitas. Hal ini didukung oleh penelitian Setia (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu : keputusan pendanaan, kebijakan dividen, keputusan investasi, struktur modal, profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai hasil bersih dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan yang diterapkan oleh sebuah perusahaan. Selain dari itu, profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan barang atau jasa yang diproduksinya. Nilai dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, karena semakin besarnya profitabilitas akan membuat nilai perusahaan semakin tinggi dan membuat investor berani berinvestasi di perusahaan tersebut.

Penelitian sebelumnya menurut Nurmayasari (2012), Prastika (2012), dan Almajali (2012) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan Munawaroh, aisyatul (2015). menyatakan bahwa ROA menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian lain ROA dapat mempengaruhi nilai perusahaan menggunakan Tobin's Q (Sucuahi, W dan Cambarihan, 2016).

Di Indonesia beberapa literatur menyebutkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan seperti penelitian Wibowo, I. dan Faradiza, S. A. (2014). menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia hanya berfokus pada laporan keuangan saja. Padahal kinerja keuangan tidak relevan lagi, harus ada informasi tambahan yang di laporkan oleh manajemen perusahaan agar menarik minat investor yakni *sustainability report*. Bagi perusahaan *sustainability report* merupakan alat ukur pencapaian target kerja dalam isu *Triple Bottom Line*. Bagi investor *sustainability report* berfungsi sebagai alat kontrol atas pencapaian kinerja perusahaan sekaligus sebagai media pertimbangan investor dalam mengalokasikan sumber daya finansialnya. Sementara bagi pemangku kepentingan lainnya menjadi tolak ukur untuk menilai kesungguhan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (Wibowo, I. dan Faradiza, S. A. 2014).

Selain itu terdapat ketidak konsistenan hasil peneliti terdahulu. Menurut Utami, Wiwik (2015). Pengungkapan *Sustainability Report* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian oleh Tarigan Josua dan Samuel Hatane (2014). bahwa dimensi ekonomi (EC) dari *Sustainability Report* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun demikian kedua hipotesis yang lain menunjukkan bahwa dimensi lingkungan (EN) dan dimensi sosial (SO) dari *Sustainability Report* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Secara empiris, penelitian ini menguji apakah *Intangible Asset* dan Profitabilitas dan *Sustainability*

Report secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati di BEI Periode 2010-2014". Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh *Intangible Asset* dan Profitabilitas dan *Sustainability Report* terhadap Nilai Perusahaan pada yang terdaftar di Indeks Sri Kehati di BEI Periode 2009-2014, (2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Intangible Asset* dan Profitabilitas dan *Sustainability Report* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati di BEI Periode 2009-2014, (3) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Intangible Asset* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati di BEI Periode 2009-2014, (4) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati di BEI Periode 2009-2014, (5) Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Sustainability Report* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati di BEI Periode 2009-2014.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya *intangible Asset*, profitabilitas, dan *sustainability report* dan bahan evaluasi bahwa di Indeks saham Sri Kehati sesuatu yang bisa meningkatkan reputasi perusahaan.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau variabel dependen adalah Nilai Perusahaan yang diproksi dengan Tobin's Q. Variabel independen sebagai variabel bebas atau variabel tidak terikat yang mempengaruhi Nilai Perusahaan adalah *Intangible Asset* yang diproksi dengan VAIC™ model, Profitabilitas dengan *Return on Asset*, *Sustainability Report* dengan SRDI.

Kieso et al (2013) yang menyatakan bahwa *intangible assets* dapat dibedakan berdasarkan empat karakteristik, yaitu *identifiability*, *manner of acquisition*, *expected period of benefit*, dan *sparebility from entire enterprise*.

Aset tak berwujud didefinisikan dalam paragraf 8 PSAK 19 (Revisi 2010) sebagai aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset tak berwujud merupakan komponen *intellectual capital* yang penting dan memiliki dampak sangat nyata bagi perusahaan (Stanfield tahun 1999 dalam Soraya L dan Syafruddin M, 2013).

Intangible asset juga dikenal dengan *intellectual assets*, *intellectual capital*, *intellectual property*, atau *knowledge capital* (Erawati dan Sudana, 2009). Dalam penelitian ini *Intangible asset* menggunakan proksi dari *intellectual capital* yaitu model VAIC™. Salah satu sumber modal perusahaan adalah *Intellectual capital* dengan memberikan keunggulan kompetitif dan nilai tambah. *Intellectual capital* yang dapat dikelola secara maksimal akan memberikan pengaruh signifikan pada pengambilan keputusan investor sehingga memberikan

kontribusi positif pada laba bersih perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan terutama pada nilai pasarnya.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama satu tahun yang dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun (Sujoko dan Soebiantara 2007 dalam Moniaga F, 2013). Dalam penelitian ini profitabilitas menggunakan proksi *return on asset*. Menurut Hery (2015) *return on asset* adalah rasio yang mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Penelitian yang dilakukan oleh Sucuahi W dan Cambarihan Jay M (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa peneliti seperti Ju Chen dan Yu Chen (2011), Gill dan Obradovich (2012), Hermuningsih (2013) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan.

Profitabilitas menggunakan *Return on Asset* dapat digunakan dalam mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan cara membandingkan laba setelah pajak dengan rata-rata total aset. Artinya keuntungan yang diperoleh atas aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin besar nilai profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya akan memberi sinyal positif bagi investor dalam melakukan investasi pada perusahaan.

Sustainability Reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada *stakeholders* baik internal maupun eksternal perusahaan mengenai kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) GRI-G4 (2013).

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan apabila perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial karena keberlanjutan merupakan keseimbangan antara ketiga dimensi tersebut. Perkembangan ekonomi dengan memperhatikan dampak lingkungan karena adanya perusahaan, dana sosial untuk program *Corporate Social Responsibility* dilaporkan dalam bentuk *sustainability report*. Pengungkapan *sustainability report* dapat meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham diperusahaan. Hal ini didukung oleh Utami Wiwik (2015), Susanto dan Tarigan, Adima (2012) bahwa *sustainability report* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Sustainability Reporting adalah cara organisasi dalam memantau dan mengkomunikasikan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan serta dapat memberi daya tarik terhadap para pemegang saham mengenai visi jangka panjang perusahaan dan memberi nilai lebih pada perusahaan apabila dari segi profit cenderung tidak meyakinkan. Tujuan perusahaan dapat terpenuhi

dengan menerbitkan *sustainability reporting* untuk menarik minat investor menanam saham di perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat.

Hubungan antara *intellectual asset*, profitabilitas, dan *sustainability report*. Terhadap nilai perusahaan digambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran yang tersaji dalam Gambar 2.

Variabel pada penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi : *intangibile asset*, profitabilitas dan *sustainability report*. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan nilai perusahaan.

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di indeks Sri-kehati tahun 2009-2014. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria yaitu: 1) Perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks Sri-Kehati di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014, 2) Perusahaan non sektor keuangan dalam indeks Sri-Kehati di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014, 3) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2009-2014, 4) Perusahaan yang menerbitkan *Sustainability Report* pada tahun 2009-2014. Sehingga, diperoleh data observasi sebanyak 48 yang terdiri dari 5 perusahaan dengan periode penelitian selama enam tahun. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel.

Populasi menurut Sugiyono (2013:117) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Sri-Kehati di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2014

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, perusahaan keuangan tidak termasuk dalam kriteria sampel dikarenakan pengukuran profitabilitas yang berbeda. Kriteria dalam pengambilan sampel sebagai berikut: (1) Perusahaan yang konsisten terdaftar dalam indeks SRI-Kehati di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2014, (2) Perusahaan non Sektor Keuangan dalam Indeks Sri Kehati pada tahun 2009-2014, (3) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan, laporan keuangan, dan *sustainability report* pada tahun 2009-2014, (4) Perusahaan yang menerbitkan *Sustainability Report* dengan data lengkap pada tahun 2009-2014.

Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan yang konsisten terdaftar di indeks SRI KEHATI di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2014.	15
2.	Perusahaan Sektor Keuangan dalam Indeks Sri Kehati pada tahun 2009-2014.	(4)
3.	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan pada tahun 2009-2014.	(1)
4.	Perusahaan yang tidak menerbitkan dan data variabel tidak lengkap pada <i>Sustainability Report</i> pada tahun 2009-2014.	(5)
5.	Jumlah sampel yang dijadikan dalam obyek penelitian	5
Jumlah data (5 x 6 tahun)		30

Sumber : Data diolah penulis (2016)

Tabel 2 menunjukkan kriteria pengambilan sampel terlihat bahwa sampel yang diambil adalah 5 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Indeks Sri Kehati.

Tabel 3. Sampel Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Kode
1	Aneka Tambang Tbk	ANTM
2	Astra Internasional Tbk	ASII
3	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	PGAS
4	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	PTBA
5	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	TLKM

Sumber : Data diolah penulis (2016)

HASIL

Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

	IA	ROA	SR	TOBIN'S Q
<i>Mean</i>	3.8121	0.1562	0.6751	1.5912
<i>Maksimum</i>	7.5395	0.3378	0.9341	3.4621
<i>Minimum</i>	-2.3600	-0.0338	0.1538	0.4039
<i>Std. Dev</i>	1.7208	0.0714	0.2684	0.7600
<i>Observations</i>	30	30	30	30

Sumber : Data yang telah diolah oleh penulis (2017)

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai mean yang lebih besar dibandingkan standar deviasi yang dapat diartikan bahwa data variabel operasional tersebut berkelompok dan tidak bervariasi.

Nilai rata-rata *intangibile asset* pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2014 sebesar 3.8121. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai VAIC™ perusahaan pada Indeks Sri-Kehati

berdasarkan klasifikasi pada penelitian Ulum (2008). termasuk dalam kategori “*common performers*”. Nilai rata-rata perusahaan pada Indeks Sri-Kehati setiap tahunnya berfluktuatif. Nilai maksimum variabel *intangible asset* adalah sebesar 7.5395 termasuk kategori “*top performers*” dan nilai minimum sebesar -2.3600 termasuk kategori “*bad performers*”. Selain itu, standar deviasi selama tahun 2009-2014 menunjukkan nilai sebesar 1.7208 yang lebih rendah dari nilai rata-rata, sehingga menunjukkan bahwa *intangible asset* tahun 2009-2014 berkelompok atau tidak bervariasi.

Nilai rata-rata profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati Bursa Efek Indonesia tahun 2009–2014 sebesar 0.1562. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati dalam menghasilkan profitabilitas. Artinya dari total aktiva yang dipergunakan operasi perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati mampu memberikan laba sebesar 0.1562. Selama periode 2009-2014 nilai maksimum variabel profitabilitas sebesar 0.3378 dan nilai minimum -0.0338. Selain itu, standar deviasi selama tahun 2009-2014 menunjukkan nilai sebesar 0.0714. Berdasarkan hasil tersebut profitabilitas tahun 2009-2014 berkelompok atau tidak bervariasi.

Nilai rata-rata *sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati Bursa Efek Indonesia tahun 2009–2014 sebesar 0.6751. Artinya rata-rata perusahaan pada Indeks Sri-Kehati yang menerbitkan *sustainability report* sebesar 0.6751. Selama periode 2009-2014 nilai maksimum variabel *sustainability report* sebesar 0.9341 dan nilai minimum 0.1538. Selain itu, standar deviasi selama tahun 2009-2014 menunjukkan nilai sebesar 0.2684. Berdasarkan hasil tersebut *sustainability report* tahun 2009-2014 berkelompok atau tidak bervariasi.

Nilai rata-rata nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati Bursa Efek Indonesia tahun 2009–2014 sebesar 1.5912. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai Tobin’s Q perusahaan pada Indeks Sri-Kehati memiliki prospek pertumbuhan yang dinilai oleh para investor sebesar 1.5912. Selama periode 2009-2014 nilai maksimum variabel nilai perusahaan sebesar 3.4621 dan nilai minimum 0.4039. Selain itu, standar deviasi selama tahun 2009-2014 menunjukkan nilai sebesar 0.7600. Berdasarkan hasil tersebut nilai perusahaan tahun 2009-2014 berkelompok atau tidak bervariasi.

Tabel 5. Hasil Uji *Fixed Effect*

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	9.136519	(4,22)	0.0002
<i>Cross-section Chi-square</i>	29.363148	4	0.0000

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2017)

Berdasarkan hasil uji signifikansi *fixed effect*, diperoleh nilai probabilitas cross section Chi-square sebesar 0,0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%

dan nilai prob *cross section F* sebesar 0,0002 lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka H1 diterima atau penelitian ini menggunakan metode *fixed effect*. Selanjutnya dilakukan pengujian antara metode *fixed effect* dengan *random effect* menggunakan uji Hausman.

Tabel 6. Hasil Uji *Random Effect*

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	1.115406	3	0.7734

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2017)

Nilai probabilitas *cross section random* (p-value) sebesar 0,7734 > 0,05, maka sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan bahwa H1 ditolak yaitu regresi data panel menggunakan metode *random effect*. Maka metode yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah metode *random effect*.

Berdasarkan pengujian model yang dilakukan, maka model yang digunakan dalam regresi data panel pada penelitian ini adalah model *Random Effect*. Tabel 4 merupakan hasil uji dengan model *Random Effect*.

Tabel 7. Model *Random Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	1.579373	0.582318	2.712217	0.0117
IA	-0.127356	0.060981	-2.088443	0.0467
ROA	43.55125	15.73619	2.767586	0.0103
SR	0.290855	0.519467	0.559911	0.5803
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.343483	<i>Mean dependent var</i>	0.342910	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.267731	<i>S.D. dependent var</i>	0.514418	
<i>S.E. of regression</i>	0.440201	<i>Sum squared resid</i>	5.038206	
<i>F-statistic</i>	4.534318	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.597448	
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.010989			
<i>Unweighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.166158	<i>Mean dependent var</i>	1.591247	
<i>Sum squared resid</i>	13.96698	<i>Durbin-Watson stat</i>	0.576235	

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2017)

Model persamaan regresi data panel yang dibentuk dalam penelitian ini merupakan model *Random Effect*. Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui nilai konstanta koefisien sehingga dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1.579373 - 0.127356 IA + 43.55125 RO + 0.290855 SR + e$$

Persamaan regresi data panel diartikan sebagai

berikut : (1) Nilai Konstanta sebesar 1.579373 menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu IA, ROA, dan SR bernilai nol, maka nilai perusahaan (Tobins'Q) yang dimiliki perusahaan di Indeks Sri-Kehati adalah sebesar 1.579373, (2) Koefisien regresi IA (x_1) sebesar -0.127356 bertanda negatif menunjukkan apabila terjadi perubahan kenaikan IA sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan) maka nilai perusahaan (Tobins'Q) yang dimiliki perusahaan yang dimiliki perusahaan di Indeks Sri-Kehati akan mengalami penurunan sebesar 0.127356 satuan, (3) Koefisien regresi ROA (x_2) sebesar 43.55125 bertanda positif menunjukkan apabila terjadi perubahan kenaikan ROA sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan) maka nilai perusahaan (Tobins'Q) yang dimiliki perusahaan di Indeks Sri-Kehati akan mengalami kenaikan sebesar 43.55125 satuan, (4) Koefisien regresi SR (x_3) sebesar 0.290855 bertanda positif menunjukkan apabila terjadi perubahan kenaikan ROA sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan) maka nilai perusahaan (Tobins'Q) yang dimiliki perusahaan yang dimiliki perusahaan di Indeks Sri-Kehati akan mengalami kenaikan sebesar 0.290855 satuan.

Berdasarkan hasil uji metode *random effect model*, diperoleh nilai Adjusted R2 (R-squared) sebesar 0.267731 atau 26,73%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari *Intangible Asset*, profitabilitas, *sustainability report* yang mampu menjelaskan variabel dependen yaitu nilai perusahaan sebesar 26,73% sedangkan sisanya 73,33 dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh bahwa nilai ($F_{statistic}$) sebesar 0,010989 < 0,05 maka H_0 ditolak, artinya *intangible asset*, profitabilitas, dan *sustainability report* memiliki pengaruh signifikan terhadap terhadap nilai perusahaan (Tobin's Q) pada indeks Sri-Kehati secara simultan atau bersama-sama.

Tabel 8. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.579373	0.582318	2.712217	0.0117
IA	-0.127356	0.060981	-2.088443	0.0467
ROA	43.55125	15.73619	2.767586	0.0103
SR	0.290855	0.519467	0.559911	0.5803

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa : (1) Variabel *Intangible Asset* (x_1) memiliki koefisien -0,127356 dengan nilai probabilitas 0,0467 < 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti variabel *intangible asset* memiliki pengaruh secara parsial dengan arah negatif terhadap variabel nilai perusahaan periode 2009-2014, (2) Variabel Profitabilitas (x_2) memiliki koefisien 43.55125 dengan nilai probabilitas 0,0103 < 0,05, maka

H_0 ditolak yang berarti variabel profitabilitas memiliki pengaruh secara parsial dengan arah positif terhadap variabel nilai perusahaan periode 2009-2014, (3) Variabel *Sustainability Report* (x_3) memiliki koefisien 0.290855 dengan nilai probabilitas 0,5803 > 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti variabel *Sustainability Report* memiliki pengaruh secara parsial dengan arah positif terhadap variabel nilai perusahaan periode 2009-2014

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial ditemukan bahwa variabel *intangible asset* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0467 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *Intangible asset* memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang dibangun penulis. Selain itu, koefisien regresi pada variabel *Intangible asset* bernilai negatif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan *Intangible asset* maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0.127356. Artinya, *intangible asset* berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini disebabkan dalam perhitungan VAICTM terdapat tiga komponen. Komponen yang memberikan nilai tinggi, hanya berasal dari komponen VAHU (*Value Added Human Capital*). Vahu menunjukkan berapa banyak *value added* yang dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk karyawan. Perusahaan yang menganggarkan beban karyawan tinggi berharap akan mendapat *value added* yang tinggi dari karyawan, tetapi anggaran yang tinggi jika tidak diimbangi dengan pelatihan dan training justru akan menurunkan produktivitas karyawan. Karyawan yang tidak produktif dan beban karyawan yang tinggi akan menurunkan laba bersih sehingga menurunkan nilai perusahaan. Sedangkan, komponen yang memberikan nilai terendah VACA dimana unsur dalam VACA terdiri dari nilai ekuitas dan laba bersih. Padahal, pasar atau investor lebih mengutamakan melihat salah satu dari ketiga komponen *intellectual capital* yaitu VACA (*capital employed*) sebagai pertimbangan mereka dalam menempatkan nilai bagi perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial ditemukan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0103 yang lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak artinya hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis yang dibangun penulis. Selain itu, koefisien regresi pada variabel profitabilitas bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan profitabilitas maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 43,55125. Artinya, profitabilitas berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas

yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit yang tinggi sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Profitabilitas yang tinggi akan mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki keuangan yang sehat dan baik, sehingga dapat mempengaruhi investor dan calon investor untuk meningkatkan permintaan saham. Selanjutnya permintaan saham yang tinggi akan mempengaruhi harga saham perusahaan sehingga terjadi hubungan positif antara profitabilitas dengan harga saham yang dimana dampaknya akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial ditemukan bahwa variabel *sustainability report* memiliki nilai probabilitas sebesar 5,038206 yang lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima artinya hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *sustainability report* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang dibangun penulis. Selain itu, koefisien regresi pada variabel *sustainability report* bernilai positif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan *sustainability report* maka nilai perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 0,290855. Hal ini disebabkan dalam membuat laporan ini bisa disebabkan beberapa hal, seperti tambahan biaya dan usaha dalam pembuatan laporan. Selain itu dengan belum adanya kewajiban dari regulator pasar modal terkait pelaporan ini juga membuat para emiten merasa belum butuh untuk menyiapkan laporan terkait. Sehingga menunjukkan investor pada indeks Sri-Kehati belum melihat elemen pada laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa : (a) *Intangible asset* pada perusahaan yang terdaftar pada indeks Sri-Kehati periode 2009-2014 memiliki nilai rata-rata sebesar 3.8121 dan standar deviasi sebesar 1.7208 lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga menunjukkan bahwa nilai intangible asset berkelompok atau tidak bervariasi, (b) Nilai maksimum VAICTM adalah 7.5395 sedangkan nilai minimum sebesar -2.3600 dan nilai standar deviasi selama tahun 2009-2014 sebesar 0.0714 yang lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga menunjukkan bahwa profitabilitas berkelompok atau tidak bervariasi. Profitabilitas pada perusahaan yang terdaftar pada indeks Sri-Kehati periode 2009 -2014 memiliki nilai rata-rata sebesar 0.1562. Nilai maksimum ROA adalah 0.3378 sedangkan nilai minimum sebesar -0.0338, (c) *Sustainability report* pada perusahaan yang terdaftar pada indeks Sri-Kehati periode 2009 -2014 memiliki nilai rata-rata sebesar 0.6751 dan standar deviasi sebesar 0.2684 yang lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga menunjukkan bahwa nilai *sustainability report* tahun 2009-2014 berkelompok atau tidak bervariasi. Nilai maksimum SRDI adalah 0.9341 sedangkan nilai

minimum selama periode penelitian sebesar -0.1538.

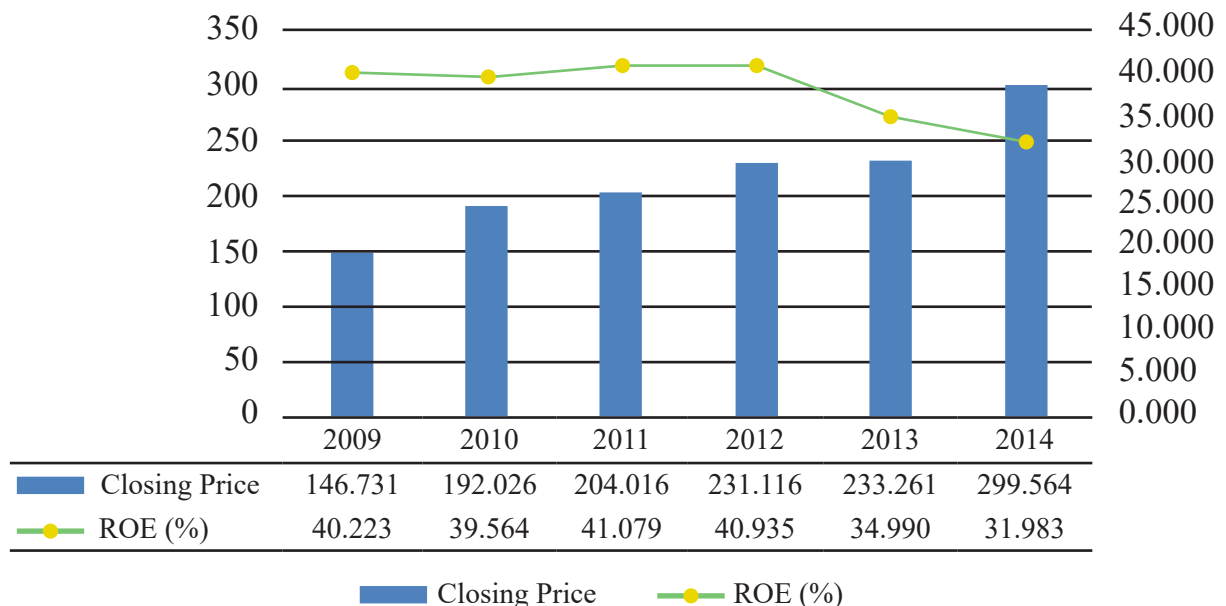
Secara simultan *intangible asset*, profitabilitas, dan *sustainability report* mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati periode 2009-2014.

Pengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri-Kehati periode 2009-2014: (a) *Intangible asset* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan; (b) Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan; dan (c) *Sustainability report* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almajali, Dr. Amal Yassin. 2012. *Factors Affecting the Financial Performance of Jordanian Insurance Companies Listed at Amman Stock Exchange*. *Journal of Management Research* ISSN 1941-899X 2012, Vol. 4, No.2.
- Chen, Li-Ju., dan Chen, Shun-Yu. 2011. *The influence of profitability on firm value with capital structure as the mediator and firm size and industry as moderators*. *Investment Management and Financial Innovations journal*, Volume 8, Issue 3, 2011.
- Coopers, P., 2004. *Management of Non-Performing Assets by Indian Banks*. IBA Bulletin, 26(1), pp.61-97.
- Erawati, N.M.A., Sudana. I.P., 2009. "Intellectual capital, Nilai perusahaan, dan Kinerja Keuangan". Makalah Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
- Florence Katthy Mawikere dan Jantje J. Tinangon. 2016. Analisis Penerapan ISAK No 14 Tahun 2010 Tentang Aset Tidak Berwujud dan Biaya Website Pada PT Bunaken Surya Wisata Tour and Travel.
- Gill, Amarjit dan Obradovich, John. 2012. *The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms*. *International Research Journal of Finance and Economics*. ISSN 1450-2887 Issue 91.
- Hatane, Semuel dan Josua tarigan (2014) Pengungkapan *Sustainability Report* dan Kinerja Keuangan. Jurnal akuntansi dan Keuangan VO. 16 Universitas Kristen Petra.
- Hermuningsih, S., 2013. Pengaruh Profitabilitas. Growth.
- Hery. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 1. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Services.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009). Jakarta :Salemba Empat.
- Lazonick, W. and O'sullivan, M., 2000. *Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate*

- governance. Economy and society*, 29(1), pp.13-35.
- Moniaga, Fernandez. Struktur Modal, Profitabilitas dan struktur Biaya terhadap Nilai Perusahaan Industri Keramik, Porcelen dan Kaca.
- Munawaroh, A., 2015. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 3(4).
- Nurmayasari, Andi. 2012. Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2007-2010). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Prastika, Ni Gst. Ayu Pt. S. 2012. Pengaruh Ios, Leverage, Dan *Dividend Yield* Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur Di BEI. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Udayana*.
- Rachmawati, Damar Asih Dwi. 2012. Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap *Return On Asset* (ROA). *Jurnal Nominal*. Volume 1.No. 1. 2012.
- Setia, Lukas. 2008. Teori dan Praktik Manajemen Keuangan. Yogyakarta :ANDI.
- Soraya, Lesta dan Muchamad Syafrudin .2013. Pengaruh Nilai Asset Tidak Berwujud dan Penelitian dan Pengembangan terhadap Nilai Pasar Perusahaan. *E-Jurnal S1 Universitas Diponegoro Volume 2 Nomor Tahun 2013*. ISSN : 2337-3806.
- Sucuahi, W. and Cambarihan, J.M., 2016. *Influence of Profitability to the Firm Value of Diversified Companies in the Philippines. Accounting and Finance Research*, 5(2), p.149.
- Sugiyono, P.D., 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: ALFABETA, CV.
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 10(2), 77-84.
- Utami, Wiwik. 2015. *Financial performance and quality of sustainability disclosure based on global reporting. Mediterranean Journal of Social Sciences (MCSE) Publishing, Rome-Italy*. ISSN 2039-2117.
- Wedgandt, J.J., Kimmel, P.D. and Kieso, D.E., 2013. *Financial Accounting: IFRS Editon*.
- Wibowo A dan Sekar akrom. 2014. Dampak pengungkapan *sustainability report* terhadap kinerja keuangan dan pasar perusahaan. *SNA 17 Mataram 2014*.
- Widhiastuti, Ni Luh P dan Made Yenni L. 2015. Pengaruh *Return On Asset* dan *Intangible Asset* terhadap Nilai Perusahaan dengan *Corporate Social Rensposibility* sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11.2 (2015): 370-38. ISSN: 2302-8556.
- www.duniainvestasi.com [Tanggal akses terakhir 26 Oktober 2016]
- www.idx.co.id [Tanggal akses terakhir 26 Oktober 2016]
- www.kehati.or.id [Tanggal akses terakhir 02 Desember 2016]
- www.sahamok.com [Tanggal akses terakhir 25 Februari 2017]
- www.sindonews.com [Tanggal akses terakhir 26 Oktober 2016]
- Yuniasih, Ni Wayan dkk. 2010. Eksplorasi Kinerja Pasar Perusahaan : Kajian berdasarkan Modal intelektual. Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto : 13-15 Oktober.



Sumber : www.duniainvestasi.com dan www.idx.co.id, data diolah oleh penulis (2016)

Gambar 1. Pergerakan Indeks Saham dan Return On Equity Sri Kehati periode 2009-2014

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Variabel Independen				
1	<i>Intangible Asset</i>	Nilai <i>intangible asset</i> lebih mudah berubah-ubah dibandingkan nilai <i>tangible asset</i> . Perubahan ini meningkatkan perbedaan antara nilai buku dengan nilai pasar (John Garger, 2010) dalam Gamaruni Rindu R tahun 2012.	(VAICTM) $VAIC^{TM} = VACA + VAHU + STVA$	RASIO
2	<i>Profitabilitas</i>	<i>Return on Asset</i> (ROA) adalah salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan (Rachmawati, Damar A.D 2012).	$ROA = \frac{EAT}{\text{Total ASET}}$	RASIO
3	<i>Sustainability Report</i>	<i>Global Reporting Initiative</i> (GRI-G4,2013) menyatakan bahwa keberlanjutan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan skor GRI melalui <i>Sustainability Reporting</i> . <i>Sustainability Reporting</i> adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada stakeholders baik internal maupun eksternal perusahaan mengenai kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>). Pelaporan <i>Sustainability</i> akan menjadi perhatian utama dalam pelaporan non keuangan.	$SRDI = \frac{V}{M}$	RASIO
Variabel Dependen				
4	Nilai Perusahaan	Menurut Sugiyono (2013:61) variabel terikat adalah variabel yang yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan nilai perusahaan.	$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$	RASIO

CAPITAL ADEQUACY RATIO, LOAN DEPOSIT RATIO DAN NON PERFORMING LOAN TERHADAP PROFITABILITAS

Alfian Agus Putranto
alfianputranto05@gmail.com
Farida Titik Kristanti
Dewa Putra Khrisna Mahardika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Abstract

ROA is used to measure the ability of the bank's management in obtaining the overall profit of the total assets owned. This study aims to examine the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR) and Non Performing Loan (NPL). Profitability is proxied by Return on Assets (ROA) in Commercial Bank listed on Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period of 2011-2015. The population in this study are the commercial bank listed on the Stock Exchange. Sample selection technique used is purposive sampling and acquired 31 commercial banks with the 2011-2015 study period. Methods of data analysis is panel data regression analysis. The results showed that simultaneous Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan Deposit Ratio (LDR) and Non Performing Loan (NPL) have a significant effect on profitability. While partially, Capital Adequacy Ratio (CAR) significant positive effect, Non Performing Loan (NPL) significant negative effect, while Loan Deposit Ratio (LDR) has no effect on profitability.

Keywords : *capital adequacy ratio, loan deposit ratio, non performing loan, return on assets*

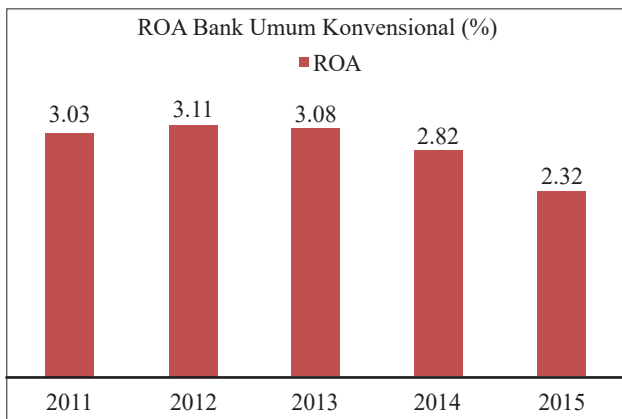
Abstrak

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan dari total aktiva yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Loan Deposit Ratio (LDR)* dan *Non Performing Loan (NPL)* terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* pada Bank Umum yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar pada BEI dengan *purposive sampling* diperoleh 31 Bank Umum dengan periode penelitian pada tahun 2011-2015. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan CAR, LDR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara parsial, CAR berpengaruh positif, NPL berpengaruh negatif, sedangkan LDR tidak berpengaruh terhadap ROA.

Kata Kunci : *capital adequacy ratio, loan deposit ratio, non performing loan, return on assets*

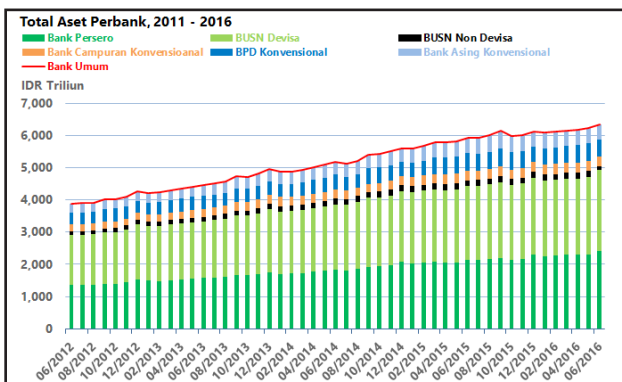
PENDAHULUAN

Salah satu ukuran kinerja perusahaan adalah tingkat keuntungan atau laba. Laporan mengenai rugi laba suatu perusahaan, termasuk perbankan, merupakan hal yang sangat penting dalam laporan tahunan. Salah satu teknik dalam analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja suatu bank. *Return On Assets* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sehingga dalam penelitian ini ROA digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Selama lima tahun terakhir ROA bank umum cenderung turun namun Aset bank umum selalu meningkat sehingga menandakan ketidakefektifan dalam mengelola aset yang ada.



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

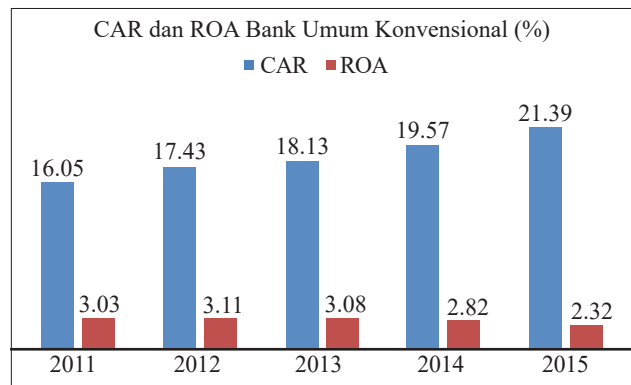
Gambar 1. Perkembangan *Return on Assets* perbankan



Sumber : OJK dan CEIC (2016)

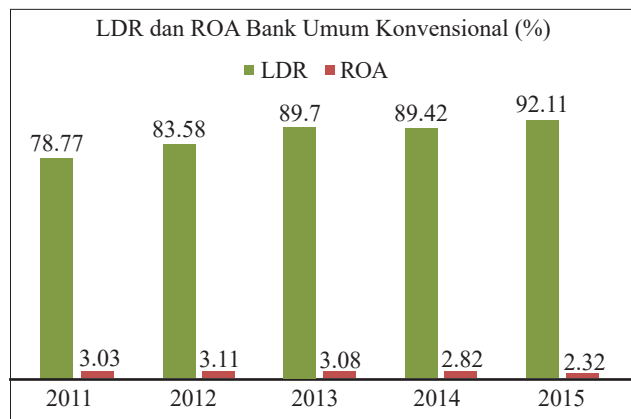
Gambar 2. Perkembangan Total Aset Perbankan

Faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi ROA yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu CAR, LDR dan NPL. Pemilihan ketiga variabel ini dikarenakan terdapat perkembangan yang tidak searah selama lima tahun terakhir.



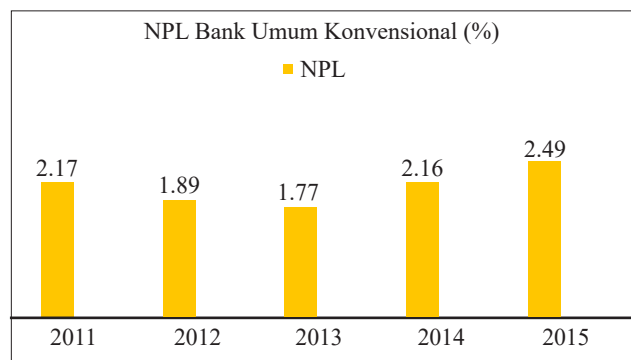
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Gambar 3. Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* perbankan



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Gambar 4. Perkembangan *Loan Deposit Ratio* perbankan



Sumber : Statistik Perbankan Indonesia

Gambar 5. Perkembangan *Non Performing Loan* perbankan

Dalam UU No.10/1998 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup kebanyakan rakyat. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kasmir (2012) mengatakan bahwa Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil.

Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk agar sinyal tersebut baik maka harus dapat ditangkap pasar dan dipresepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk (Meginson dalam Durrotun, 2012).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat aset tertentu. *Return On Asset* (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Selain itu, ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Dengan mengetahui ROA, dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.

$$ROA = \frac{EAT}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Menurut Wardiah (2013) CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. Semakin tinggi CAR, maka akan semakin besar kemampuan bank dalam meminimalisir risiko kredit yang terjadi sehingga kredit bermasalah yang terjadi dalam bank akan semakin rendah. Formula yang ditentukan oleh Bank for International Settlement (BIS) atas CAR adalah rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Latumaerissa (2014:96) mengemukakan bahwa rasio LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memberikan pinjaman dengan seluruh dana yang dimiliki (*loan up*) atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dialirkan ke dalam aktivitas penyaluran

kredit, pinjaman atau pemberian kredit. *Loan Deposit Ratio* merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun. Rasio likuiditas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berada di kisaran 78%-100%. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba.

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Mahmoeddin (2010) kredit bermasalah adalah kredit di mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan angungan dan sebagainya. Kredit dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendapatan maupun beban bank, karena jika kredit berada pada batas wajar atau lancar kredit dapat menjadi sumber penerimaan yang efektif untuk bank, sebaliknya jika kredit berada pada level macet kredit dapat menjadi sumber kerugian bank. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional bahwa tingkat rasio NPL tidak boleh lebih dari 5%.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) yang ikut dibiaya dari modal sendiri di samping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. Semakin tinggi rasio CAR maka profitabilitas bank akan meningkat karena kerugian-kerugian yang ditanggung bank dapat diserap oleh modal yang dimiliki bank tersebut. CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA sesuai dengan hasil penelitian Lyla Rahma (2011) dan Kunto Wibisono (2012).

Loan Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi rasio tersebut memberi indikasi semakin tinggi juga kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat likuiditas bank tersebut maka profitabilitas bank semakin meningkat. *Loan Deposit Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riski Agustiningrum (2012) dan Hardiyanti (2012).

NPL ini sangat mempengaruhi kinerja bank terutama kualitas aset dan semakin besar risiko kredit yang ditanggung pihak bank yang berarti kinerja keuangan bank semakin menurun. Hal ini juga mengindikasikan menurunnya profitabilitas yang diraih oleh bank tersebut. menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan sesuai dengan hasil penelitian Hasil penelitian Lyla Rahma (2011) dan Riski Agustiningrum (2012).

METODE

Operasionalisasi variabel ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel dan Konsep Variabel	Indikator	Skala
CAR (X_1) adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah (Kasmir 2014).	$CAR = \frac{\text{Modal Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$	Rasio
LDR (X_2) <i>Loan to Deposit Ratio</i> adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Kasmir 2014).	$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$	Rasio
NPL (X_3) Kredit bermasalah atau non performing loan adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. (Apriani 2011).	$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit yang bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$	Rasio
ROA (Y) Return On Asset adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. (kasmir 2012)	$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	Rasio

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang dan diperoleh 155 unit sampel dari 31 sampel perusahaan sektor perbankan selama tahun 2011-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan regresi data panel dengan persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Y = ROA
 α = Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi masing masing variabel independen
 X_{1it} = CAR
 X_{2it} = LDR
 X_{3it} = NPL
 e = Error term

HASIL

Hasil analisis deskriptif variabel operasional ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	CAR	LDR	NPL	ROA
Mean	0.1834	0.8295	0.0226	0.0163
Maximum	0.8749	1.4072	0.1228	0.0542
Minimum	0.0941	0.4346	0	-0.0758
Std. Dev.	0.1025	0.1352	0.0176	0.0169
Observ.	155	155	155	155

Berdasarkan data dari Tabel 2 menunjukkan bahwa tiga variabel operasional yang memiliki nilai mean lebih besar dibandingkan standar deviasi yaitu CAR, LDR dan NPL yang dapat diartikan bahwa data tersebut tidak menyebar dan tidak bervariasi, sedangkan pada variabel ROA terdapat nilai mean yang lebih kecil dari standar deviasi yang berarti bahwa data tersebut menyebar dan bervariasi.

PEMBAHASAN

Nilai rata-rata CAR perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015 adalah sebesar 0,1834 dikategorikan baik karena di atas minimum 8% yang ditetapkan. Nilai rata-rata dari CAR sebesar 0,1834 dengan standar deviasi sebesar 0,1025253 atau 10,25% yang artinya memiliki tingkat penyimpangan yang kecil serta data relatif homogen. Nilai maksimum dari CAR yaitu sebesar 0,8749 atau 87,49% sangat baik jauh ketentuan minimal yang dimiliki oleh Bank Nationalnoba Tbk

pada tahun 2013. Berdasarkan Annual Report 2013 Bank Nationalnobu Tbk (NOBU). Nilai minimum dari CAR yaitu sebesar 0,0941 atau 9,41% yang dimiliki oleh Bank J Trust Indonesia Tbk (BCIC) tahun 2011 sedikit tiis di atas ketentuan namun masih tergolong baik.

LDR merupakan rasio yang mengukur penyaluran dana dari peminjaman menggunakan dana yang dihimpun dari pembiayaan. Berdasarkan Tabel 2. LDR memiliki nilai rata-rata sebesar 0,8295 tergolong baik dalam fungsi intermediasi maupun tingkat likuiditas diantara 78-100%. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,1352 atau 13,52% yang lebih kecil dari mean itu artinya memiliki tingkat penyimpangan yang kecil serta relatif. Nilai maksimum LDR sebesar 1,4072 atau 140,72% yang dimiliki oleh Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk pada tahun 2015 menunjukkan likuiditas yang mengkhawatirkan atas dana pihak ketiga karena di atas 100%. Nilai minimum LDR sebesar 0,4346 atau 43,46% yang dimiliki oleh Bank Nationalnobu Tbk pada tahun 2015 hal ini menunjukkan tingkat intermediasi yang rendah dari bank dalam memberikan pinjaman ke masyarakat.

NPL memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0226 artinya mash di batas bawah 5% yang telah ditetapkan. Nilai rata-rata tersebut memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu sebesar 0,0176 itu artinya bahwa nilai standar deviasi tersebut kurang dari nilai rata-rata dan memiliki tingkat penyimpangan yang kecil serta relatif homogen karena semakin kecil tingkat penyimpangannya maka semakin kecil pula variasi datanya. Nilai maksimum dari NPL adalah 0,1228 atau 12,28% yang dimiliki oleh Bank J Trust Indonesia Tbk pada tahun 2015 yang artinya terdaat kredit bermasalah yg tinggi hingga melewati batas aman. Nilai minimum dari NPL adalah 0,0000 atau 0% dimiliki oleh Bank Nationalnobu Tbk (BCAS) sepanjang tahun 2011 hingga 2015 di mana syarat yang ketat dalam memberikan pinjaman mmbuat nilai NPL nya aman.

Rata-rata ROA sebesar 0,0163 sehingga secara rata-rata keseluruhan bank umum memperoleh profitabilitas yang baik dan tidak merugi dan tergolong baik setidaknya rata-rata yang ada tidak menunjukkan nilai negatif. Standar deviasi sebesar 0,0169 atau 1,70% itu artinya ROA memiliki standar deviasi yang lebih besar sehingga nilai rata-rata ROA memiliki tingkat penyimpangan yang besar dan data relatif heterogen berdasarkan rata-rata tersebut, terdapat tujuh bank umum yang memiliki ROA diatas rata-rata selama lima tahun berturut-turut. Nilai maksimum ROA dimiliki oleh Bank Mestika Dharma Tbk pada tahun 2013 sebesar 0,0542 atau 5,42%. Nilai minimum dimiliki oleh Bank J Trust Indonesia Tbk pada tahun 2013 sebesar -0,0758 atau -7,58% buruk karena mengalami kerugian.

Berdasarkan regresi data panel dengan metode *random effect*, Pengujian untuk menentukan model yang cocok antara *common effect* atau *fixed effect*

sehingga sesuai untuk penelitian yang dilakukan dengan uji chow dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu: (a) *Probability (p-value) Cross-section F* < 0,05 atau *Probability (p-value) Cross-section Chi-square* < 0,05 maka H_0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa model yang lebih baik adalah *Fixed Effect*. (b) *Probability (p-value) Cross-section F* > 0,05 atau *Probability (p-value) Cross-section Chi-square* > 0,05 maka H_0 diterima atau dapat dikatakan bahwa model yang yang lebih baik adalah *Common Effect*.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	9.373822	(30,121)	0.0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	186.185282	30	0.0000

Sumber: Hasil output Eviews versi 9

Hasil Uji Chow, menunjukkan *probability (p-value) cross section F* sebesar 0.0000 < 0,05 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Dapat diputuskan bahwa model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*. Setelah Uji Chow selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan Uji Hausman.

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan model yang cocok antara *fixed effect* atau *random effect* sehingga sesuai untuk penelitian yang dilakukan.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	4.432317	3	0.2184

Sumber: Hasil output Eviews versi 9

Tabel 5. Hasil Pengujian Signifikansi *Random Effect*

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	2.309174	0.788729	2.927713	0.0039
CAR	13.82708	6.775727	2.040678	0.0430
LDR	-37.60208	49.86710	-0.754046	0.4520
NPL	-0.465841	0.061388	-7.588474	0.0000
<i>Effects Specification</i>		<i>S.D.</i>	<i>Rho</i>	
<i>Cross-section random</i>		1.149779	0.6358	
<i>Idiosyncratic random</i>		0.870287	0.3642	
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0.294122	<i>Mean dependent var</i>	0.522754	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.280098	<i>S.D. dependent var</i>	1.030566	
<i>S.E. of regression</i>	0.874404	<i>Sum squared resid</i>	115.4520	

<i>F-statistic</i>	20.97270	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.711481
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		
<i>Unweighted Statistics</i>			
<i>R-squared</i>	0.283017	<i>Mean dependent var</i>	1.630387
<i>Sum squared resid</i>	318.7025	<i>Durbin-Watson stat</i>	0.923704

Hasil Uji Hausman, menunjukkan *p-value cross-section* random sebesar 0.2184 > 0,05 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan data tersebut, model regresi data panel yang digunakan adalah *Model Random Effect* lebih baik daripada *Model fixed Effect*.

Adjusted R-Squared model penelitian adalah sebesar 0,280098 atau 28%, dan signifikan, maka CAR, LDR dan NPL dapat menjelaskan atau mempengaruhi yaitu profitabilitas bank umum di Indonesia periode 2011-2015 yang diprosikan dengan ROA sebesar 28%, sedangkan sisanya yaitu 72% dipengaruhi oleh variabel lain.

Capital adequacy ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. *Loan deposit ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berarti LDR yang tinggi tidak serta memberikan profitabilitas yang tinggi juga dikarenakan harus dilihat juga apakah total kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun berjalan dengan efektif dengan melihat NPL yang menggambarkan total kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Hal ini didukung melihat di mana pada data terdapat 5 Bank yang memiliki LDR di bawah dari interval ketetapan Bank Indonesia yakni 78% sepanjang tahun 2011 hingga 2016 (Kecuali Bank Nobu pada 2011) namun tetap memperoleh nilai positif pada profitabilitasnya. Non performing loan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

KESIMPULAN

Capital Adequacy Ratio, Loan Deposit Ratio, Non Performing Loan, dan Return On Assets sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015 dikategorikan baik, karena berada dalam batas yang ditetapkan Bank Indonesia.

Secara simultan CAR, LDR dan NPL berpengaruh

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan secara parsial, CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Sedangkan LDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bagi perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyani, Lyla Rahma. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Agustiningrum, Riski. 2012. Analisis Pengaruh CAR, NPL, Dan LDR Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 2 No. 8
- Hardiyanti. 2012. Pengaruh CAR, NPL Dan LDR Terhadap ROA Pada Bank Bumn Yang Go-Public Di Indonesia. Jurnal Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar
- Kasmir. S.E., M.M. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Depok: Rajagrafinda Persada.
- Latumaerissa, Julius R. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Latumaerissa, J.R., 2014. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmoeddin, A.S., 2010. Melacak Kredit Bermasalah, cetakan pertama. Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Minning Durrotun Nikmah, A., 2012. Sistem Informasi Penjualan Online Pada Sugiarto Rattan Furniture Jepara (Doctoral dissertation, Universitas Muria Kudus).
- Wardiah, M.L., 2013. Dasar-Dasar Perbankan. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Wibisono, Kunto. 2012. Pengaruh CAR, NPL, NIM, Dan LDR Pada Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Di Indonesia. Jurnal Akuntansi UNTAN JEDA2 Vol 1 No.

OPINI AUDIT, TINGKAT KEMANDIRIAN, DAN TIPE PEMERINTAH DAERAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI

Annisa Murni Prasasti
annisamurni95@gmail.com

Sri Rahayu
Djusnimar Zutilisna
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Abstract

This research aims to analyze the effect of the audit opinion, level of independence, and the type of local government to the level of disclosure of information on the official website of the local Government of Central Java province in 2014-2015. Sampling techniques used in this study is a purposive and retrieved samples of as many as 25 local governments. Methods of data analysis used were descriptive and multiple regression. The results showed that the audit opinion, level of independence, and the type of local government effect simultaneously against the level of disclosure of information on the official website of the local government in the province of Central Java. Partially, the audit opinion and the types of local government that have an impact on the level of disclosure of information on the official website of the local government in the province of Central Java. Level of independence has not an impact, partially.

Keywords : *audit opinion, level of independence, type of local government, level of disclosure information*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 25 pemerintah daerah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deksriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe pemerintah daerah memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Secara parsial, opini audit dan tipe pemerintah daerah yang memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemandirian tidak memiliki pengaruh secara parsial.

Kata Kunci : *opini audit, tingkat kemandirian, tipe daerah, tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hal tersebut didukung dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menurut asas otonomi dan tugas pembantuannya, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah dimana wewenang atas pengelolaan masing-masing daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, maka pengelolaan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat ingin mengetahui bagaimana pengelolaan pemerintah daerah yang dilakukan selama ini. Oleh karena itu, informasi yang diungkapkan pemerintah daerah kepada masyarakat harus jelas. Informasi tersebut berupa informasi keuangan maupun informasi non keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat serta pihak ketiga yang memberikan pembiayaan. Pengungkapan informasi dapat dilakukan pemerintah daerah melalui media elektronik yaitu situs resmi (*e-government*). Hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, pemerintah daerah menggunakan nama domain go.id. Pengungkapan informasi melalui situs resmi sangat efektif dan efisien bagi pengguna informasi, seperti pemerintah, masyarakat, dan investor. Bagi pemerintah, pengungkapan informasi dapat membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan. Masyarakat dan investor dapat mengakses informasi tentang daerah agar memahami potensi daerahnya sehingga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Perintah untuk pengungkapan informasi pemerintahan pada situs resmi diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang mewajibkan pelaporan informasi keuangan daerah secara berkala melalui dokumen tertulis dan situs resmi pemerintah daerah dengan tujuan untuk melakukan publikasi kepada pengguna informasi. Keterbukaan informasi adalah hak dari pengguna informasi, seperti masyarakat, investor, maupun pemerintah itu sendiri. Hal tersebut juga didukung dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.188.52/1797/SC/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dimana pemerintah daerah harus menyiapkan menu konten dan melakukan publikasi data mutakhir dalam menu konten tersebut pada situs resminya.

Transparansi dan kepercayaan layanan informasi publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan.

Daerah di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi perintah untuk membuat menu konten TPAD dalam situs resmi pemerintah daerah, namun masih ada beberapa pemerintah daerah yang tidak memiliki menu konten tersebut sehingga pengguna informasi kesulitan untuk mendapatkan informasi. Situs resmi pemerintah daerah yang telah menyediakan menu konten ternyata juga masih belum melakukan pengungkapan 12 item yang seharusnya diungkapkan (situs resmi pemerintah daerah). Salah satu item yang masih belum diungkapkan dalam situs resmi adalah satu set Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang *up to date*. Hal tersebut terbukti karena masih tingginya sengketa informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih enggan melakukan keterbukaan informasi publik (www.interface.or.id)

Pengembangan situs resmi pemerintah daerah bertujuan agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi dan layanan pemerintah daerah dengan mudah, dan ikut serta untuk berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Pemerintah daerah hendaknya mengembangkan situs resmi dengan isi yang selalu baru, ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang memenuhi kebutuhan pengguna informasi, serta mudah diakses. Sebuah situs resmi pemerintah daerah mempunyai persyaratan minimal untuk isi website tersebut. Sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemda yang telah diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informasi, situs website pemda diharapkan dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan dapat dikunjungi dan diminati oleh banyak orang dan merupakan kebanggaan tersendiri apabila tidak hanya dibuka oleh masyarakat daerahnya sendiri, melainkan masyarakat seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Salah satu parameternya adalah minimum konten atau isi dan layanan publik. Pada saat ini sudah banyak situs resmi pemerintah daerah yang dapat diakses dengan berbagai macam informasi dan tampilan. Hal tersebut mengakibatkan informasi minimum dan layanan publik yang seharusnya disajikan tetapi tidak tersedia dalam situs resmi pemerintah daerah (situs resmi pemerintah daerah).

Dalam kaitannya dalam pengungkapan informasi baik informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, seperti opini audit. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini audit adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit adalah informasi yang penting untuk diketahui oleh pengguna informasi, baik pemerintah itu sendiri untuk mengetahui

kinerja dan melakukan evaluasi, serta masyarakat dan investor untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah daerah. Opini audit secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini audit yang diberikan oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran pada LKPD. Opini audit ditentukan dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan BPK seperti kesesuaian dengan SAP dan kecukupan pengungkapan.

Opini audit juga didasarkan kepada pengungkapan informasi yang dilakukan Pemda dalam LKPDnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Rahim dan Martani (2012) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh pada pengungkapan informasi, baik keuangan maupun non keuangan. Hilmi (2010) juga membuktikan bahwa tingkat penyimpangan keuangan pada temuan audit berpengaruh positif. Menurut berita yang diakses di semarang.bpk.go.id, Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi hasil opini audit tidak dapat diakses sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui langsung perolehan opini terhadap pemerintah daerah tersebut.

Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah (TPD) dan bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Tingkat kemandirian dapat menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang berasal dari pendapatan asli daerah. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak kedua di Pulau Jawa (www.otda.kemendagri.go.id), yaitu enam kota dan dua puluh sembilan (29) kabupaten. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan cukup tinggi, tetapi masih memiliki tingkat kemandirian yang rendah (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah). Hal tersebut menandakan bahwa pendapatan asli daerah belum optimal dan masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat untuk pembiayaan daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahim dan Martani (2012) tingkat kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi, baik keuangan maupun non keuangan. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2010) tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam situs resmi pemerintah daerah.

Pembagian daerah otonom di Indonesia yaitu pemerintah provinsi disebut sebagai daerah otonom tingkat I, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota disebut sebagai daerah otonom tingkat II. Perbedaan kabupaten dan kota terletak pada kondisi geografis dan

demografis, seperti aspek ekonomi, sosial, serta budaya. Pada umumnya, kabupaten memiliki daerah yang lebih luas daripada daerah kota tetapi kepadatan penduduknya lebih kecil dan sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian. Sementara itu daerah kota terdiri dari daerah metropolitan dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan umumnya bekerja di bidang perdagangan dan jasa yang lebih modern. Penelitian sebelumnya yang menggunakan faktor tipe daerah yaitu Rahim dan Martani (2012) hasilnya jenis daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki situs resmi telah mengungkapkan informasi keuangan, pelayanan dan informasi lainnya dalam situsnya, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengakses situs resmi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2010) mengatakan bahwa pengungkapan informasi dalam website pemerintah daerah masih tergolong rendah, di bawah level 50%, yaitu 44.84%. Selain itu, informasi yang disajikan masih sebatas pada informasi umum daerah. Informasi tentang keuangan dan pembangunan masih sedikit diungkapkan, seperti informasi yang disajikan oleh situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang masih belum optimal dan beberapa situs resmi tidak menyajikan informasi keuangan secara up to date karena informasi keuangan yang tersedia adalah informasi beberapa tahun ke belakang, antara 2010-2013. (www.jatengprov.go.id)

Pengungkapan (*disclosure*) secara konseptual merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2010:578). Tingkat pengungkapan informasi berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk pengungkapan dan pelaksanaan dari *e-government* di Indonesia.

Pengungkapan informasi baik keuangan maupun non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah dapat membantu pemerintah daerah menyampaikan informasi secara cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Sementara, pengguna informasi internal seperti pemerintah daerah dan pengguna informasi eksternal, seperti masyarakat dan investor dapat mengakses informasi dengan mudah, dimana saja dan kapan saja. Faktor-faktor seperti opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe daerah dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah. Semakin bagus kualitas pemerintah maka akan mempengaruhi pemberian opini audit kepada pemerintahan daerah tersebut. Selain itu, tingkat kemandirian juga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada

situs resmi pemerintah daerah karena apabila suatu daerah termasuk daerah yang mandiri untuk membiayai kegiatan pemerintahannya maka daerah tersebut akan melakukan pengungkapan sebagai bentuk transparansi kepada publik. Tipe daerah juga akan berpengaruh karena apabila daerah berbentuk kota yang cenderung lengkap dengan berbagai fasilitas maka akan lebih mudah untuk melakukan pengungkapan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Rahim dan Martani (2012) yang menyebutkan bahwa opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe daerah berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website pemda.

Opini audit merupakan salah satu indikator akuntabilitas terhadap sebuah laporan keuangan. Opini audit diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menunjukkan tingkat kewajaran terhadap suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tingkat kewajaran yang diberikan merupakan jenis opini audit yang diberikan, yaitu mulai tingkat kewajaran yang sangat baik hingga buruk. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini yang paling baik, kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Apabila tingkat materialitas rendah dalam LKPD maka pemerintah daerah akan mendapatkan opini yang baik atau tingkat kewajarannya tinggi. Apabila suatu pemerintah daerah mendapatkan pendapat atau opini audit yang baik maka akan melakukan pengungkapan informasi kepada publik sehingga dapat menarik investor dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan daerah tersebut. Hal tersebut didukung oleh penelitian Rahim dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi pada website pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian Chen, et.al (2015) juga mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi.

Tingkat kemandirian daerah adalah kemampuan sebuah daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Di Indonesia, pelaksanaan pemerintah daerah sebagian besar masih bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi setiap daerah memiliki potensi-potensi masing-masing yang dapat digali dan dikembangkan sehingga menghasilkan sumber pendapatan asli daerah (PAD), termasuk Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Jawa Tengah memiliki jumlah kabupaten dan kota terbanyak kedua di Indonesia, maka Jawa Tengah harus dapat mengembangkan potensi yang dimiliki agar dapat melaksanakan pemerintahannya dengan baik. Semakin tinggi tingkat kemandirian maka pemerintah daerah akan lebih terbuka dalam melakukan pengungkapan informasi. Pengungkapan dilakukan agar publik mengetahui dan mempercayai bahwa pemerintahan daerah tersebut telah dapat berjalan dengan baik.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Mustika dan Martani (2012), hasilnya adalah kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs pemerintah daerah di Indonesia.

Di Indonesia, daerah otonom dibagi menjadi dua, yaitu daerah otonom I adalah provinsi, dan daerah otonom II adalah kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota memiliki perbedaan dari sudut pandang demografis dan geografisnya. Kabupaten biasanya terdiri dari daerah pedesaan yang memiliki daerah yang lebih luas jika dibandingkan daerah kota. Akan tetapi, kepadatan penduduknya akan lebih banyak di kota. Karakteristik yang berbeda antara kabupaten dan kota dapat menyebabkan perbedaan tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah. Penduduk kota yang pada umumnya memiliki wawasan yang luas akan lebih kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintahan yang berbentuk kota cenderung melakukan tingkat pengungkapan informasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten.

Penelitian yang mendukung adalah penelitian Laswad, et.al (2005) yang memasukkan jenis daerah sebagai salah satu variabel yang akan diuji. Hasilnya adalah daerah kota memiliki tingkat pengungkapan informasi keuangan pada website yang lebih tinggi daripada kabupaten. Maria, et.al (2010) juga mengungkapkan bahwa jenis entitas berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan tahunan sektor publik. Di Indonesia, penelitian dilakukan Rahim dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa jenis daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2014:70). Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut : (1) Opini audit, tingkat kemandirian daerah, dan tipe daerah berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap tingkat pengungkapan informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015. (2) Opini audit berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015. (3) Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015. (4) Tipe daerah berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi baik informasi keuangan maupun non keuangan pada

situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015.

Menurut Sekaran (2014:115) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel pada penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sekaran, 2014:117) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini audit, tingkat kemandirian daerah, dan tipe daerah.

Opini menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit diberikan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan kriteria tersebut, maka opini audit diukur dari perolehan opini yang diperoleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah menggunakan variabel dummy, yaitu mendapatkan nilai 1 apabila pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai 0 apabila Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Abdul Halim (2013) kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Abdul Halim (2013) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah sendiri ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus seperti berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal

18 Ayat (1) UUD 1945). Pembentukan daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2, daerah provinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Daerah kabupaten atau kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten atau kota. Penelitian ini menggunakan daerah kota atau kabupaten yang diukur dengan variabel dummy, yaitu memberikan nilai 1 untuk daerah kota dan nilai 0 untuk daerah kabupaten.

Variabel dependen atau variabel terikat menurut Sugiyono (2013:61) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah. Menurut Evans (dalam Suwardjono, 2010:581), luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of disclosure*). Tingkat pengungkapan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pengungkapan informasi keuangan dan informasi non keuangan yang terdapat pada situs resmi pemerintah daerah.

Tingkat pengungkapan informasi keuangan diukur dari indeks pengungkapan keuangan yang dilihat dari data mutakhir menu konten Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada pada situs resmi pemerintah daerah. Laporan keuangan yang harus disajikan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : (a) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (b) Neraca, (c) Laporan Arus Kas, (d) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Data mutakhir menu konten TPAD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah meliputi: (a) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (b) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (c) Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (d) Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (e) Laporan Realisasi Anggaran seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, (f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Informasi non keuangan diukur dari indeks pengungkapan non keuangan yang terdapat dalam Panduan Pengembangan Website Pemda (2010) yang menyebutkan konten minimum yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut : (a) Selayang Pandang, (b) Pemerintah Daerah, (c) Geografi, (d) Peta Wilayah dan Sumber Daya, (e) Peraturan/kebijakan daerah, (f) Berita, (g) Forum diskusi, (h) Saran/Komentar pengunjung pada buku tamu.

Selain itu tingkat pengungkapan informasi non keuangan juga diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dimana terdapat 26 urusan wajib yang harus diselenggarakan pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.

Tingkat pengungkapan informasi diukur dengan cara melakukan checklist terhadap item yang diungkapkan pada situs resmi pemerintah daerah kemudian menjumlah seluruh item pengungkapan dan membandingkan dengan item yang seharusnya diungkapkan.

METODE

Operasionalisasi variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 1. Populasi penelitian adalah situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Berikut ini adalah kriteria pengambilan sampel yang digunakan :

Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria Pengambilan Sampel	Total Pemerintah Daerah
1.	Situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri	35
2.	Situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak dapat diakses	(0)
3.	Situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang tidak mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014-2015 pada situs resmi	(10)
Jumlah Sampel		25
Jumlah Tahun		2
Total Sampel		50

Sumber : Data sekunder yang telah diolah, 2017

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Rumus regresi berganda pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y	= Tingkat Pengungkapan Informasi pada Situs Resmi Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
X_1	= Opini Audit
X_2	= Tingkat Kemandirian
X_3	= Tipe Daerah
e	= Error

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis secara simultan (uji F) dan uji secara parsial (uji t). Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Ghozali, 2011).

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1	Opini Audit	Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yang disajikan dalam laporan keuangan. (UU No.15 Tahun 2004)	Menggunakan variabel dummy, 1 = opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 0 = opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Nominal

2	Tingkat Kemandirian Daerah	Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2013)	Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	Rasio
3	Tipe Daerah	Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945)	Menggunakan variabel dummy, 1 = pemerintahan kota 0 = pemerintahan kabupaten	Nominal
4	Tingkat Pengungkapan Informasi keuangan dan non keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah	Luas pengungkapan berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, disebut dengan tingkat pengungkapan (levels of disclosure). Suwadjono (2010:581)	Item informasi keuangan dan non keuangan yang diungkapkan pada situs resmi pemerintah daerah Item informasi keuangan dan non keuangan yang seharusnya diungkapkan	Rasio

HASIL

Tabel 3 adalah hasil statistik deskriptif setiap variabel.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	50	.00	1.00	.3600	.48487
Tingkat Kemandirian	50	.00	23.90	13.889	3.72987
Tipe Daerah	50	.00	1.00	.0800	.27405
Tingkat Pengungkapan Informasi	50	35.42	89.58	63.375	11.99392
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 20, 2017

Rumus regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat pengungkapan informasi} = 57.478 + 0.065 \text{ Opini Audit} + 0.352 \text{ Tingkat Kemandirian} + 15.492 \text{ Tipe Daerah} + e$$

Jika nilai variabel independen 0 maka tingkat pengungkapan pada situs resmi pemerintah daerah adalah 57.478%. Koefisien opini audit sebesar 0.065 artinya jika opini audit mengalami kenaikan sebesar 1 dan nilai variabel lain tetap maka tingkat pengungkapan pada situs resmi pemda naik sebesar 0.065. Koefisien

tingkat kemandirian sebesar 0.0352 artinya jika tingkat kemandirian mengalami kenaikan sebesar 1 dan nilai variabel lain tetap maka tingkat pengungkapan pada situs resmi pemda naik sebesar 0.0352. Koefisien tipe daerah sebesar 15.492 artinya jika tipe daerah mengalami kenaikan sebesar 1 dan nilai variabel lain tetap maka tingkat pengungkapan pada situs resmi pemda naik sebesar 15.492.

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik dan tidak ditemukan permasalahan dalam pengujian. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis secara simultan (uji F). Berikut hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) pada penelitian ini :

Tabel 4. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1291.988	3	430.663	3.441	.024 ^b
	Residual	5756.867	46	125.149		
	Total	7048.855	49			

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan Informasi

b. Predictors: (Constant), Tipe Pemerintah Daerah, Opini Audit, Tingkat Kemandirian

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 4, nilai signifikansi sebesar 0.024 < 0.05 artinya bahwa opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe daerah berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Berikut hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) :

Tabel 5. Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	57.478	7.141		8.049	.000
Opini Audit	.065	3.313	.027	.199	.043
Tingkat Kemandirian	.362	.552	.110	.675	.503
Tipe Daerah	15.492	7.125	.354	2.174	.035

a. Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2017

PEMBAHASAN

Hasil dari uji deskriptif dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah sampel (n) sebanyak 50 daerah kabupaten dan kota. Opini audit memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1 karena menggunakan variabel dummy dalam pengukuran variabelnya. Kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Nilai 1 diberikan kepada daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai 0 diberikan kepada daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini audit memiliki nilai rata-rata (mean) 0.36 atau 36% dari total sampel daerah di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama tahun 2014-2015. Standar deviasi opini audit adalah sebesar 0.48487 yang artinya bahwa sebagian besar data memiliki jarak sebesar 0.48487 dari nilai rata-rata (mean). Nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data tersebut bervariasi atau tidak berkelompok.

Variabel tingkat kemandirian memiliki nilai minimum 0.00 dan nilai maksimum 23.90%, artinya tingkat pendapatan asli daerah paling besar di Provinsi Jawa Tengah sebesar 23.90% dari total pendapatan daerahnya. Nilai rata-rata (mean) tingkat kemandirian yaitu sebesar 13.89% yang berarti bahwa tingkat kemandirian daerah di Provinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar 13.89% dan menunjukkan daerah yang memiliki kemandirian yang kurang untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehingga masih memiliki ketergantungan dengan pihak lain, seperti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Daerah di Provinsi Jawa Tengah rata-rata hanya memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 13.89% dari total pendapatan yang diperoleh. Tingkat kemandirian memiliki standar

deviasi 3.72987 yang menandakan bahwa sebagian besar data memiliki jarak sebesar 3.72987 dari nilai rata-rata (mean). Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata menandakan bahwa data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok.

Tipe daerah memiliki nilai maksimum 1.00 dan nilai minimum 0.00 karena menggunakan variabel dummy dalam pengukurannya. Nilai 1 diberikan kepada tipe daerah kota dan 0 untuk daerah tipe daerah kabupaten. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Jawa Tengah memiliki pembagian daerah kota dan kabupaten di bawah pemerintahan Provinsi. Nilai rata-rata (mean) tipe daerah adalah 0.08 yang menandakan bahwa hanya sebesar 8% dari total sampel (n) yang memiliki nilai 1 atau daerah dengan tipe kota. Tipe daerah memiliki standar deviasi sebesar 0.274 artinya adalah sebagian besar data yang terdistribusi memiliki jarak sebesar 0.274 dari nilai rata-ratanya. Standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai rata-rata tipe daerah menandakan bahwa data tersebut bervariasi atau tidak berkelompok.

Variabel tingkat pengungkapan yang diukur dari pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan memiliki nilai minimum 35.42% dan nilai maksimum 89.58%, artinya daerah di Provinsi Jawa Tengah melakukan pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah paling rendah yaitu 35.42% dari total item pengungkapan yang seharusnya dan paling tinggi 89.58% dari total item pengungkapan yang seharusnya diungkapkan.. Nilai rata-rata (mean) sebesar 63.38% yang berarti bahwa daerah di Provinsi Jawa Tengah melakukan pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah sebesar 63.38% dari total item pengungkapan sebanyak 48 item. Standar deviasi tingkat pengungkapan yaitu sebesar 11.994 yang berarti bahwa sebagian besar data yang terdistribusi memiliki jarak 11.994 dari nilai rata-rata (mean). Nilai standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

Variabel opini audit memiliki koefisien 0.065 dengan nilai probabilitas signifikansi $0.043 < 0.05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti semakin tinggi nilai opini audit maka tingkat pengungkapan informasi akan semakin besar. Pemerintah daerah yang memiliki opini audit yang bagus berarti memiliki pelaporan dan pelaksanaan keuangan yang baik dan cenderung tidak akan menutupi informasi pelaksanaan yang baik ini. Pengungkapan informasi keuangan pada situs resmi yang memiliki opini audit yang bagus akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat terhadap pemerintah daerahnya. Sehingga akan mendorong terciptanya transparansi informasi kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Rahim dan Martani (2012)[11] dan Chen et.al (2015)[3] yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi.

Variabel tingkat kemandirian memiliki koefisien 0.362 dengan nilai probabilitas signifikansi $0.503 > 0.05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat kemandirian tidak memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Semakin tinggi rasio tingkat kemandirian pemerintah daerah menunjukkan semakin mandiri pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga ketergantungan terhadap pihak eksternal menjadi rendah. Hal inilah yang membuat pemerintah daerah tidak termotivasi untuk meningkatkan pengungkapan informasi baik keuangan maupun non keuangan karena rendahnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari pihak eksternal. Selain itu, pada penelitian ini tingkat pengungkapan informasi yang digunakan adalah informasi keuangan dan non keuangan. Oleh sebab itu, tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi karena tingkat kemandirian cenderung dilihat dari sisi keuangan karena diukur menggunakan perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Arik et.al (2014) dan Hilmi (2010) yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi.

Variabel tipe daerah memiliki koefisien 15.492 dengan nilai probabilitas signifikansi $0.035 < 0.05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa tipe daerah yang semakin tinggi, kota maka tingkat pengungkapan informasi semakin naik. Pemerintah daerah yang berbentuk kota memiliki struktur daerah dan karakteristik penduduk yang berbeda dengan pemerintah kabupaten. Kondisi lingkungan yang lebih modern dan lingkungan ekonomi yang lebih baik dapat meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat akan pelaksanaan pemerintahan. Hal tersebut akan mendorong permintaan akan informasi pelaksanaan pemerintah sebagai bentuk pengawasan publik menjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah kabupaten. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Rahim dan Martani (2012), Rahman dkk (2013), dan Arik et.al (2014) yang menyatakan bahwa tipe daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit, tingkat kemandirian, dan tipe daerah mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2014-2015. Opini audit dan tipe daerah memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015, sedangkan tingkat kemandirian tidak memiliki pengaruh signifikan.

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah daerah di berbagai Provinsi di Indonesia sebagai sampel agar lebih mengetahui tingkat pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat pengungkapan, seperti leverage, tingkat investasi sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Bagi Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat fokus untuk dapat meningkatkan perolehan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah harus memiliki peningkatan di aspek sosial, budaya, ekonomi agar setara dengan kota sehingga dapat melakukan pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah. Sebagai regulator perlu menegaskan peraturan mengenai pengungkapan informasi, baik informasi keuangan maupun non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui media yang mudah dan murah untuk diakses. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, baik masyarakat maupun investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat: Jakarta
- Arik, Susbiyanti, et.al., 2014. The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement : A Study from Local Government in Indonesia. Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.10, 2014
- Chen, et.al., 2015. Disclosure of Government Financial Information and the Cost of Local Government's Debt Financing-Empirical Evidence from Provincial Investment Bonds for Urban Construction. China Journal of Accounting Research 9 (2016) 191-206.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate

- dengan Program IBM SPSS 20. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hilmi, Amiruddin Zul. 2011. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi 2012, Universitas Indonesia: Jakarta
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. 2005. Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101-121.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Pemerintah Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahim, Wanda Mustika dan Martani, Dwi.2012. Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Website Pemerintah Daerah. Universitas Indonesia: Jakarta
- Rahman, Aditya dkk. 2013. Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September 2013. Universitas Sebelas Maret: Surakarta
- Suwardjono. 2014. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (1), (2).
www.interface.or.id (Diakses pada 23 Desember 2016)
www.jatengprov.go.id (Diakses pada 19 September 2016)